

**ANALISIS HUBUNGAN PASANGAN CALON ALHARIS
DAN ABDULLAH SANI DENGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI
PROVINSI JAMBI 2024**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu
Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Oleh:

NURUL SYAFITRI

B1B221080

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS HUBUNGAN PASANGAN CALON ALHARIS DAN ABDULLAH SANI DENGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI 2024

Nama : Nurul Syafitri
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : B1B221080

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan ke Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 24 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Nasuhaidi, S.Pd, S.Sos., M.Si.
NIP : 198407072024211014

Galank Pratama, S.I.P., M.Si.
NIP : 19970413202406100

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUBUNGAN PASANGAN CALON ALHARIS DAN ABDULLAH SANI DENGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI 2024

Nama : Nurul Syafitri

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Politik

Nim : B1B221080

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas

Hukum Universitas Jambi

Jambi, 10 Juli 2025

Dosen Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dimasrizal, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Anggota	2.
3	Galank Pratama, S.I.P., M.Si.	Anggota	3.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini pada:

- ❖ Kedua Orangtuaku
- ❖ Kakak dan Abangku
- ❖ Almamater Tercintaku

LEMBAR MOTTO

“One word that can change your world, consistent”

“Hiduplah dengan tujuan”

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nurul Syafitri
NIM : B1B221080
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Hubungan Pasangan Calon Alharis Dan Abdullah Sani Dengan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2024
Alamat : Tenam, Muara Bulian, Batanghari
No. HP : 0887437095758

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, BAK di Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan pernyataan perundang-perundangan yang telah berlaku.

Jambi, 24 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan

Nurul Syafitri
B1B221080

ABSTRACT

This research analyses the factors behind the massive support from 14 political parties towards the pair of candidates Al Haris and Abdullah Sani in the 2024 Jambi Provincial Governor and Deputy Governor Election. Using the framework of the patron-client relationship of James C. Scott, this qualitative research identifies four main characteristics of patronage relationships: inequality, reciprocity, loyalty, and personal relationships. The data was collected through in-depth interviews with informants from seven main supporting political parties (Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, and PKS) as well as a political observer. Widespread support for the Al Haris-Abdullah Sani couple in the 2024 Jambi Regional Election reflects the dynamics of a complex patron-client relationship, characterised by disparity in power and resources where major parties (patrons) control the political legitimacy needed by candidates (clients). This relationship is reciprocal, where the party provides political support and resources with the hope that the winning candidate will carry out the party agenda and strengthen their position in the region, reinforced by the existence of strategic cadres such as Abdullah Sani. The party's loyalty to the candidate, although claimed not to be personal, shows institutional compliance based on performance and electability that benefits the party, even to the point of sacrificing the ambitions of other cadres. Finally, personal closeness between candidates and party elites through intensive communication and informal activities becomes an important social capital that strengthens trust and commitment, facilitating the exchange of political and electoral support.

Keywords: Patron-Client Politics, 2024 Jambi Regional Election, Political Party Support, Al Haris-Abdullah Sani, Inequality, Reciprocity, Loyalty, Personal Relationships.

INTISARI

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dukungan masif dari 14 partai politik terhadap pasangan calon Al Haris dan Abdullah Sani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2024. Menggunakan kerangka teori relasi patron-klien James C. Scott, penelitian kualitatif ini mengidentifikasi empat ciri utama hubungan patronase: ketimpangan, resiprositas, loyalitas, dan hubungan personal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari tujuh partai politik pendukung utama (Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, dan PKS) serta seorang pengamat politik. Dukungan luas terhadap pasangan Al Haris-Abdullah Sani dalam Pilkada Jambi 2024 mencerminkan dinamika relasi patron-klien yang kompleks, ditandai oleh ketimpangan kekuasaan dan sumber daya di mana partai besar (patron) mengontrol legitimasi politik yang dibutuhkan calon (klien). Hubungan ini bersifat resiprokal, di mana partai memberikan dukungan politik dan sumber daya dengan harapan calon yang menang akan menjalankan agenda partai dan memperkuat posisi mereka di daerah, diperkuat oleh keberadaan kader strategis seperti Abdullah Sani. Loyalitas partai terhadap calon, meskipun diklaim bukan personal, menunjukkan kepatuhan institusional berdasarkan kinerja dan elektabilitas yang menguntungkan partai, bahkan hingga mengorbankan ambisi kader lain. Terakhir, kedekatan personal antara calon dan elit partai melalui komunikasi intensif dan kegiatan informal menjadi modal sosial penting yang memperkuat kepercayaan dan komitmen, memfasilitasi pertukaran dukungan politik dan elektoral.

Kata Kunci: Politik Patron-Klien, Pilkada Jambi 2024, Dukungan Partai Politik, Al Haris-Abdullah Sani, Ketimpangan, Resiprositas, Loyalitas, Hubungan Personal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'alla. Yang maha pengasih dan penyayang serta pemilik Rizki karena berkat kasih dan sayang-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang berjudul **”Analisis Hubungan Pasangan Calon Alharis Dan Abdullah Sani Dengan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2024”** guna memenuhi syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Peneliti menyadari, bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada yang terhormat :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana kepada mahasiswa Universitas Jambi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan peran yang besar dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum.

4. Ibu Dr. Hj. Muskidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Akademik, Bapak Umar Hasan ,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., S.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Universitas Jambi

5. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I. Pol., Ph.D., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan yang telah memberikan dukungan, saran, dan arahan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan agar menjadi sarjana yang memiliki kualitas dan integritas.

6. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP.,M.IP., Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang selalu memberikan akses, solusi, dan kemudahan bagi mahasiswa Ilmu Politik dalam melaksanakan studi dan telah memberikan solusi terhadap problematika perkuliahan yang dihadapi mahasiswa.

7. Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.Selaku Dosen Pembimbing 1 penulis dalam mengerjakan skripsi yang juga sudah seperti orang tua sendiri sebagai tempat mengadu, memberi nasihat dan motivasi.

8. Galank Pratama, S.I.P., M.Si., Dosen Pembimbing 2 yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dimasrizal, S.Sos., M.Si Pembahas utama dewan penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

10. Bapak DR. Raden Sarwani, S.H., M.P.A. selaku pembimbing akademik penulis, yang selalu mendukung dalam perkuliahan dan administrasi studi penulis.

11. Segenap Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan terhadap Penulis.

12. Terima Kasih kepada Partai yang menjadi tempat penelitian yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Ayahanda tercinta M.Saman yang telah membesarkan, menafkahi, mendidik penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Seluruh pujian dan terima kasih sangat layak diutarakan, sehat selalu panutan. *I love You Forever*

14. Terimakasih dan sejuta pujian untukmu Ibunda tersayang Asmah dalam semua cinta dan kasih sayang yang diberikan hingga sekarang dan selamanya, segala dukungan dan usaha yang telah dilakukan olehmu menjadi saksi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Sehat dan selalu bahagia.

15. Terima kasih kepada Kakak Erlawati dan Abang Ahmad Kurniadi atas segala bantuan dan dukungan hingga adik kecil kalian bisa melakukan pendidikan hingga S1.

16. Terima kasih kepada Beasiswa KIP KULIAH dimana kuliah yang tidak mungkin bagi penulis sebelumnya telah mengubah bahwa tidak ada yang tidak mungkin.

17. Terimakasih Richard Gerald Purba yang telah menemani proses skripsi ini dari awal hingga penulis berada di titik ini. Dukungan dan segala semangat yang

diberikan menjadi penguat dan penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. *Stay With Me Forever.*

18. Teman-teman seperjuangan Syafiqah, Tesa, Serik, Ikhsan, Shofy, Alda. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan menemani perjalanan penulis dalam pendidikan ini.

19, Terima Kasih kepada diri sendiri penulis ucapkan karena telah menjadi kuat dengan segala ujian yang datang saat bangku perkuliahan, tetaplah baik, bahagia, beruntung dan ceria.

20. Terima kasih kepada aplikasi tiktok yang menjadi pelarian penulis ketika lelah dan memberikan hiburan serta bantuan dikala penulis terdesak dan tidak ada motivasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan kemurahan hati segala pihak yang terlibat. Penulis sadar dalam pembuatan Skripsi ini masih jauh dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Jambi, Juni 2025

Penulis

Nurul Syafitri

NIM. B1B221080

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Landasan Teori.....	12
1. Teori Relasi Patron-klien	12
F. Kerangka Berpikir	16
G. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Fokus dan Dimensi Penelitian	18
4. Sumber Data	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
7. Teknik Analisis Data	21
8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)	22
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	23
2.1 Deskripsi Umum Partai Politik Pendukung Alharis-Sani yang Lolos Parlemen.....	23
2.1.2.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	27
2.1.3.Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).....	30
2.1.4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	34

2.1.5. Partai Demokrat	38
2.1.6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	42
2.1.7. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	46
2.2. Deskripsi Umum Provinsi Jambi.....	50
2.3. Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jambi	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
3.1. Apa Faktor Dukungan Banyak Partai Politik Terhadap Paslon Al Haris- Sani Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jambi. 56	
3.1.1. Ketimpangan.....	58
3.1.2 Hubungan Resiprositas	73
3.1.3. Hubungan Loyalitas	88
3.1.4 Hubungan Personal	101
BAB IV PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan.....	117
4.2. Saran	117
Daftar Pustaka.....	119
LAMPIRAN.....	122
A. Dokumentasi Penelitian.....	122

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Sah Partai Pengusul Haris-Sani	6
Tabel 1. 2 Daftar Informan.....	20
Tabel 2. 1 Perolehan suara di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	54

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Partai Golkar	26
Gambar 2. 2 Partai PDI Perjuangan	30
Gambar 2. 3 Partai Gerindra	33
Gambar 2. 4 Partai PKB.....	36
Gambar 2. 5 Partai Demokrat.....	41
Gambar 2. 6 Partai PPP	45
Gambar 2. 7 Partai PKS	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah negara. Di negara – negara yang menganut ideologi demokrasi, pemilu merupakan kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia, Pemilu merupakan ekspresi demokrasi yang sebenarnya dan merupakan sarana menyatakan kedaulatan rakyat atas bangsa dan pemerintahan. Pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen demokrasi, dan dapat dikatakan sebagai salah satu wujud mewujudkan kedaulatan rakyat serta melahirkan wakil – wakil rakyat dan pemimpin yang ambisius, berkualitas dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adalah proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih Kepala Daerah dan wakilnya di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia dan diatur oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan. Pilkada bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang akan mengelola

¹ Sudirman Herman, Ihyani Malik, and Riska Sari, "SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA," vol. 2, 2021, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

pemerintahan setempat. Proses ini meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Pilkada diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di bawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)².

Setelah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan 2024, Pemilu presiden, dan Pemilu parlemen 2024, masyarakat Indonesia akan segera menyambut Pilkada Serentak tingkat daerah tahun 2024 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November mendatang 2024. Menurut data KPU, Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Secara spesifik, Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 Provinsi, 415 daerah pemilihan, dan 93 Kota. Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 dimana terdapat dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur resmi mengikuti Pilkada Jambi 2024, mereka adalah Al – Haris – Abdullah Sani dan Romi Haryanto – Sudirman.

Politik patron-klien merupakan fenomena yang telah mengakar kuat dalam dinamika politik di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Sistem ini melibatkan hubungan dua arah antara patron (individu atau kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuasaan lebih) dengan klien (individu atau kelompok yang berada pada posisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih rendah). Dalam konteks politik, hubungan ini biasanya terjadi antara elite partai politik, politisi,

² Afif, "Pengertian Dan Sejarah Singkat Pilkada Di Indonesia," ANTARA, May 24, 2024.

atau pejabat publik dengan masyarakat, pemilih, atau kelompok tertentu. Patron memberikan berbagai bentuk bantuan baik materi seperti uang, barang, jasa, hingga akses pekerjaan atau proyek sebagai imbalan atas dukungan politik dari klien.³

Hubungan patron-klien tidak hanya sekadar pertukaran sumber daya, tetapi juga membentuk jejaring sosial dan kekuasaan yang saling menguntungkan. Patron menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh loyalitas dan dukungan dari klien, sedangkan klien mendapatkan jaminan sosial, perlindungan, atau akses terhadap sumber daya yang sulit mereka peroleh secara mandiri. Dalam praktiknya, hubungan ini sering kali bersifat eksploitatif dan menciptakan ketergantungan, di mana klien merasa berutang budi kepada patron dan cenderung mengikuti arahan politik patron dalam setiap kontestasi politik, seperti pemilihan umum. Fenomena patron-klien semakin menguat ketika institusi politik formal tidak berjalan efektif dan terjadi ketimpangan ekonomi yang tinggi. Dalam kondisi ini, masyarakat lebih mengandalkan jaringan informal melalui patron untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga memperkuat praktik politik transaksional seperti politik uang.

Di Indonesia, praktik ini sering dijumpai menjelang pemilu melalui fenomena "serangan fajar", di mana politisi membagikan uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan suara. Sistem patron-klien juga berperan dalam pembentukan budaya politik yang feodal dan memperkuat struktur kekuasaan yang timpang. Patron, yang biasanya berasal dari kalangan elite, berupaya

³ Sidih Iwan, "RELASI PATRON KLIEN DALAM KETERPILIHAN RAY SURYADI ARSYAD PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DAPIL II KOTA MAKASSAR," n.d.

mempertahankan status dan pengaruhnya dengan terus mengumpulkan harta dan memberikan bantuan kepada klien, sementara klien tetap bergantung pada patron untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dan perlindungan sosial. Akibatnya, praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga menghambat upaya pemberdayaan masyarakat dan pembentukan institusi politik yang sehat.

Pada Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Paslon Pramono Anung-Rano Karno menjadi Paslon yang pertama pada 28 Agustus 2024 pukul 11.05 WIB. Mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta (Muliawati, 2024). Di hari yang sama disusul paslon Ridwan Kamil-Suswono pada pukul 13.56 WIB. Pada tanggal 29 Agustus 2024 terdapat satu paslon lagi yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana⁴.

Paslon Ridwan Kamil-Suswono menjadi paslon yang banyak mendapat dukungan partai politik. 15 partai politik telah menyatakan dukungan kepada paslon tersebut. 15 partai politik tersebut yaitu PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (Delvira, 2024).

⁴ Dwi Rahmawati, "Tiga Pasang Calon Pemimpin Untuk Warga Jakarta," detikNews, September 23, 2024.

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Lahir pada tanggal 23 November 1973 di Desa Sekancing, Merangin, Provinsi Jambi. Ia memulai tugasnya sebagai Bupati Merangin pada 6 Agustus 2013 dengan didampingi Abdul Kafid sebagai wakil bupati. Periode kedua, ia kembali mengambil alih jabatan Bupati Merangin, kali ini didampingi Mashuri sebagai wakil Bupati Merangin. Pada Pilkada Serentak 2020, Alharis berhasil memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Gubernur Jambi, serta dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2021 bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani.

Abdullah Sani sendiri merupakan politikus dan ulama yang aktif di Jambi. Ia lahir pada tanggal 8 September 1956. Abdullah Sani akan menjabat Wakil Gubernur Jambi pada tahun 2021 hingga 2024. Ia merupakan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang terpilih saat Pilkada 2020 pada pemilihan Gubernur Provinsi Jambi bersama Al Haris. Sani sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Jambi pada tahun 2013 hingga 2018. Pada Pilgub Jambi 2020, Abdullah Sani maju sebagai calon wakil gubernur Jambi bersama Bupati Merangin Al Haris. Pasangan ini memperoleh 596.621 suara atau 38,07% berdasarkan ringkasan hasil Pilgub Jambi pada 9 Desember 2020 dan 600.733 suara setelah melakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS pada 27 Mei 2021.

Dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Al Haris – Abdullah Sani didukung koalisi kuat, sebanyak 14 partai politik (Parpol) mendukung kedua pasangan tersebut. Ke – 14 parpol tersebut adalah partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, Demokrat, Perindo, Buruh, PBB, Umat, dan Garuda. Sebanyak 1,8 juta suara sah dari partai politik bersatu memenuhi kriteria

suara sah. Memperoleh sebanyak 14 Parpol menjadi tanda tanya bagaimana bisa paslon nomor urut 2 itu bisa didukung oleh banyak partai⁵.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut⁶. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jambi 2.695.348 pemilih dimana laki-laki berjumlah 1.358.892 dan perempuan berjumlah 1.336.348 pemilih⁷.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Sah Partai Pengusul Haris-Sani

No	Partai Pengusul	Jumlah Kursi	Perolehan Suara
1	PAN	10	328.647
2	GOLKAR	7	254.048
3	PDIP	6	263.071
4	GERINDRA	6	228.994
5	PKB	6	172.657
6	DEMOKRAT	5	190.594
7	PPP	5	175.368
8	PKS	5	139.310
9	PERINDO	0	27.890
10	PARTAI UMMAT	0	10.077
11	PARTAI BURUH	0	9996
12	HANURA	0	7903
13	PBB	0	5716
14	GARUDA	0	3032

⁵ Redaksi, "14 Partai Koalisi Al Haris-Sani Siap Menangkan Pilgub Jambi 2024," JERNIH.ID, August 28, 2024.

⁶ Partai Buruh et al., "IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 60 / PUU-XXII / 2024 Tentang Syarat Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah" 000 (2024): 1–9.

⁷ Tuyani, "KPU Jambi Tetapkan DPT 2,69 Juta Pemilih Pada Pilkada 2024," n.d., <https://jambi.antaranews.com/berita/589403/kpu-jambi-tetapkan-dpt-269-juta-pemilih-pada-pilkada-2024>.

Di Provinsi Jambi juga terjadi pemberian dukungan oleh banyak parpol terhadap salah satu Paslon. Haris-Sani memperoleh dukungan dari 14 partai politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Jambi tahun 2024 karena beberapa faktor strategis dan kekuatan politik yang dimilikinya. Memiliki nilai jual tinggi, terutama karena hasil survei yang bagus. Hal ini menjadi daya tarik bagi banyak partai politik untuk mendukungnya, seperti yang disebutkan oleh pengamat politik Wawan Novianto dalam pemberitaan detik sumbagsel. Al – Haris juga telah menunjukkan komitmen tegas dalam membangun Provinsi Jambi. Namun jika dilihat dari beberapa program yang dibangun tidak berjalan baik selama satu periode menimbulkan pertanyaan besar mengapa partai politik mendukung paslon tersebut.

Relasi yang dibangun oleh paslon Al – Haris dan Sani terbilang sangat menguntungkan mereka pada pilkada serentak 2024 ini. Dimana koalisi yang dibangun oleh Parpol menciptakan peluang besar bagi paslon dengan nomor urut 2 tersebut. Dalam pemberitaan Radar Jambi.co.id menyebutkan, Cek Endra selaku ketua DPD I Golkar Jambi menyatakan dan menegaskan kepada seluruh kader Golkar agar memenangkan Haris dan Sani pada pilkada serentak. Cek Endra sendiri merupakan rival Haris dan Sani pada pilkada 2020 yang mana Cek Endra sendiri berpasangan dengan Ratu Munawaroh sebagai calon wakil Gubernur Provinsi jambi.

Pasangan calon Al – Haris dan Abdullah Sani juga menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Berdasarkan pemberitaan detiksumbagsel.com penyerahan rekomendasi berupa dokumen B.1-KWK itu diserahkan langsung oleh

Sekjen Gerindra yakni Ahmad Muzani di kantor DPP Gerindra Jakarta. Tampak hadir dalam penyerahan dokumen B.1-KWK itu Al – Haris beserta Abdullah Sani dengan didampingi Ketua Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra. Ritas Mariyanto mengatakan keinginan Gerindra mengusung Al – Haris dan Sani bukan sekedar survei saja, melainkan banyak faktor yang jadi pertimbangan. Selain karena Gerindra ingin adanya keberlanjutan pembangunan daerah, Al – Haris yang berasal dari partai PAN yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju⁸.

Dari beberapa masalah di atas, peneliti melakukan beberapa penelitian awal untuk menemukan masalah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian mengenai relasi kuasa, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, Yohanes Negong yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan: Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone – Kabupaten Flores Timur”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan setara gender. Meskipun kesadaran perempuan telah meningkat pesat, mereka masih belum berani menyampaikan pendapatnya di lembaga pembina desa. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan oligarki yang otoriter dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu membahas tentang partisipasi politik perempuan dan dampaknya pada pembangunan desa di desa Watoone. Peneliti

⁸ Ferdi Almunanda, “Gerindra Susul PDIP Usung Al Haris-Sani Secara Resmi Di Pilgub Jambi ,” *detiksumbagsel*, August 24, 2024.

terdahulu menemukan perlu adanya partisipasi ataupun relasi kuasa dari setiap gender agar pembangunan desa bisa disesuaikan untuk setiap gender, dalam hal ini adalah perempuan Sedangkan penelitian sekarang akan membahas mengenai relasi kuasa yang dimiliki Al Haris-Sani dan pengaruhnya pada dukungan politik dan strategi kampanye yang akan dilakukan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam skala penelitian dimana penelitian terdahulu hanya berada pada skala desa, sedangkan penelitian sekarang berada pada skala politik provinsi dengan analisis terhadap pasangan calon di Pilkada.

Kedua, “Relasi Kekuasaan Suara: Politik Patron-Klien pada Pilkada Langsung Tahun 2020 di Kabupaten Globogan” karya Muhammad Nastein dan Catur Nugroho. Penelitian ini berfokus pada praktik politik patron-klien yang terjadi pada pemilukada dimana sepasang calon petahana bersaing memperebutkan kursi yang kosong. Ia menekankan bahwa pemilu langsung, yang dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi, dirusak oleh praktik perdagangan yang merugikan pemilih. Hubungan patron-pelanggan melibatkan pertukaran kepentingan antara otoritas dan perwakilan masyarakat, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga loyalitas pemilih, dan juga pengaruh kebijakan moneter. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada praktik dan patronase masyarakat dapat mempengaruhi kualitas demokrasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang salah satunya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana praktik patron-klien bekerja dalam memenangkan dukungan politik melalui pertukaran kepentingan yang dapat merugikan pemilih dan dampaknya terhadap perilaku

pemilih dan elit politik. Sedangkan penelitian sekarang akan berfokus pada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Provinsi Jambi 2024, Al Haris-Sani, dalam mendapatkan kekuatan politik yang berasal dari dukungan-dukungan partai. Penelitian terdahulu dan sekarang juga memiliki perbedaan terhadap metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian sekarang memiliki metode penelitian yang lebih bersifat kualitatif dengan analisis terhadap interaksi antara aktor politik.

Setelah melihat beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai pemberian banyak dukungan partai terhadap paslon gubernur dan wakil gubernur. Ini merupakan hal baru yang menarik untuk diteliti mengenai bagaimana kekuasaan bisa dijadikan sebagai kekuatan politik dalam kontesasi pilkada. Bagaimana 14 partai politik dapat memutuskan untuk mendukung Haris-Sani menjadi tujuan utama untuk mencari tahu bagaimana *power* seseorang dapat mempengaruhi individu atau kelompok tertentu.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yakni:

1. Apa Faktor Yang Menyebabkan Banyak Partai Politik Mendukung Paslon Alharis-Sani Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis faktor pemberian dukungan oleh banyak partai politik terhadap paslon Al haris-Sani termasuk sumber kekuasaan seperti partai politik, kelompok sosial, dan orang – orang berpengaruh.

D. Manfaat Penelitian

Dengan menganalisis hubungan Al Haris-Sani dengan partai politik, penelitian ini memungkinkan kita mengidentifikasi sumber daya dan faktor yang melatarbelakangi pemberian dukungan oleh partai politik. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan akademis dan profesional tentang bagaimana proses politik. Dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu politik dan komunikasi massa.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan membantu memberikan informasi serta merangsang pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan pengembangan pengetahuan terkait relasi kekuasaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa yang ingin dicari pembaca mengenai pemahaman politik jelang pilkada.
- b. Diharapkan juga dapat memberikan wawasan lebih jauh kepada pembaca.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan baku untuk pengembangan dan perluasan lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Relasi Patron-klien

Ada beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu hubungan tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan Konsumen “patronase”⁹. Patron berasal dari bahasa latin yaitu *patronas* atau bermakna bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata *cliens* yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah patron secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah¹⁰.

Teori patronase merujuk pada konsep sosial yang menjelaskan hubungan antara patron (pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya) dan klien (pihak yang bergantung pada patron). Hubungan ini ditandai dengan keutuhan kekuasaan, di mana patron memberikan dukungan, perlindungan, atau sumber daya kepada klien, sementara klien memberikan loyalitas dan dukungan sebagai kesewenang-wenangan. James C. Scott menggambarkan patron-klien itu adalah hubungan dua

⁹ Zaman Komar and Kausar, “ANALISIS HUBUNGAN PATRON-KLIEN (STUDI KASUS HUBUNGAN TOKE DAN PETANI SAWIT POLA SWADAYA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU),” vol. 2, 2011.

¹⁰ Putra Kurniadi, Tesis: “Perilaku Politik Elit Politik Lokal Pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 (studi kasus di kelurahan Sei- Jang kecamatan Bukit Bestari”, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja, 2013

orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi lebih tinggi. Bagi Scott, patron menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya agar dapat dialokasikan untuk perlindungan dan keuntungan orang lain yang disebut klien. Menurut Scott, alokasi sumber daya dari pelindung kepada klien, mendorong klien memberikan dukungan, termasuk layanan pribadi kepada pelindung. Poin penting dalam kelompok patron-klien adalah hubungan kekuasaan, di mana pelindung mempunyai kekuasaan atas klien. Karena pelindung memiliki kemampuan, status sosial, kekayaan dan pengaruh dalam masyarakat dibandingkan kliennya. Dengan sumber daya yang dimilikinya, pelindung dapat mempengaruhi klien untuk membutuhkan bantuannya dan para klien membalasnya dengan memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelindung.¹¹

Hubungan Patron-Klien merupakan sebuah pertukaran hubungan antara kedua peran. Hubungan ini terutama melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosial ekonomi lebih tinggi yakni patron menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah yakni klien. Gagasan tentang keseimbangan agak kompleks, karena ini berurusan dengan ketimpangang kekuasaan sumber daya, Perhatian ditujukan tidak kepada apakah pertukaran ini timpang, tapi sejauh mana ketimpanganya. Hubungan patron-klien adalah jenis hubungan sosial di mana ada perbedaan dalam hal sumber daya, kekuasaan, dan status antara dua pihak, yaitu patron dan klien. Patron adalah pihak yang memiliki

¹¹ Mochdar Soleman and Kamaruddin Salim, "HUBUNGAN PATRON-KLIEN DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GERINDRA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014," n.d.

kekuasaan lebih besar dan memberikan perlindungan, bantuan ekonomi, serta kebutuhan dasar kepada klien, terutama saat terjadi krisis. Sebagai balas jasa, klien memberikan loyalitas, dukungan, dan layanan pribadi. Namun, pertukaran ini tidak selalu seimbang dan bisa menyebabkan klien menjadi tergantung pada patron. Hubungan ini bersifat personal, dilakukan secara langsung, dan biasanya terjadi di lingkungan komunitas kecil. Hubungan ini memiliki struktur hierarkis, tetapi kedua belah pihak tetap membutuhkan. Selain itu, relasi patron-klien bersifat fleksibel dan tidak terikat kontrak formal, sehingga kedua pihak harus menjaga keseimbangan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Keseluruhan ciri ini menunjukkan bahwa hubungan patron-klien bukan sekadar hubungan kekuasaan satu arah, melainkan interaksi sosial yang kompleks dan dinamis dalam masyarakat agraris.¹²

Scott adalah seorang ahli sosiologi dan antropologi yang banyak berkecimpung dengan tema-tema seputar patronase, Scott memang tidak secara langsung memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran. Meskipun demikian, jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. Menurut Scott, hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang

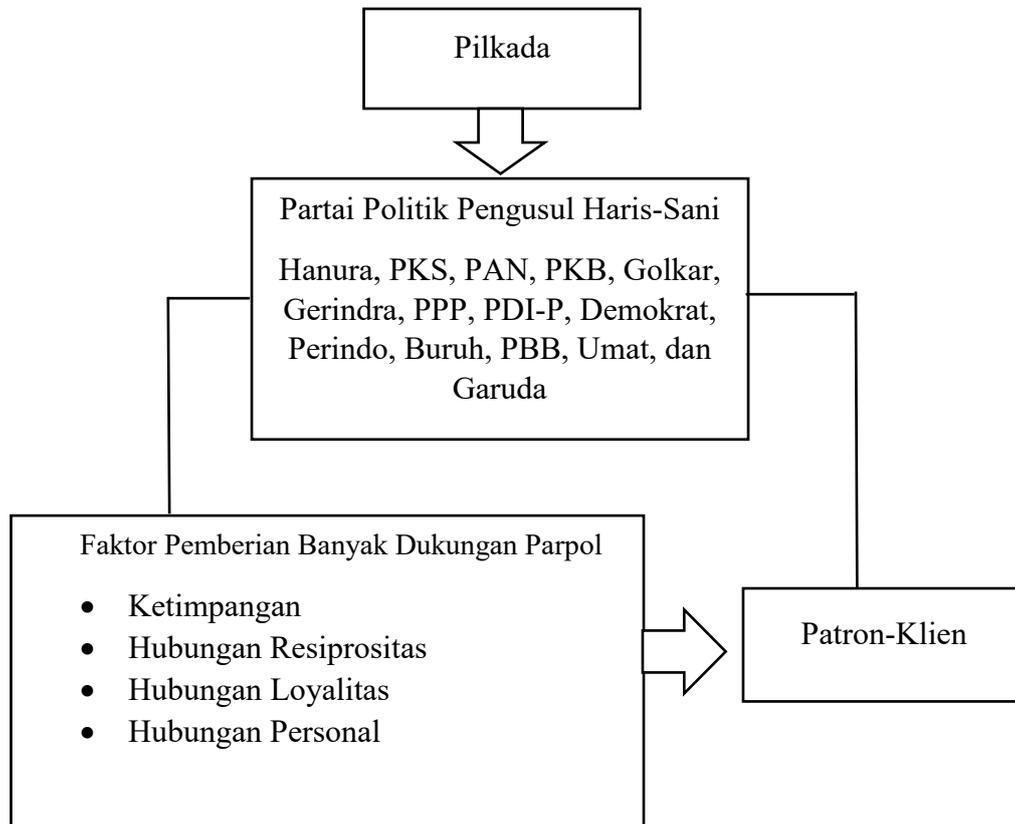
¹² Scoot C James, PERLAWANAN KAUM TANI, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 7

atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut. James Scott mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut.¹³

1. Ketimpangan, dimana individu dengan status sosial-ekonomi lebih tinggi dengan individu yang lebih rendah yang menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk mengendalikan individu atau kelompok.
2. Hubungan Resiprositas, yakni hubungan timbal balik dimana patron dan klien saling bertukar keuntungan.
3. Hubungan Loyalitas, Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan.
4. Hubungan Personal, hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat kekrabatan atau persahabatan

¹³ *Ibid*, hlm 8

F. Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Observasi alami. Dimana dalam metode penelitian ini adalah mengumpulkan data data dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan kepada sumber terkait dengan cara menganalisis konsep dan hasil yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat diungkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya¹⁴.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti tentang bagaimana partai politik tersebut memutuskan untuk mendukung Haris-Sani secara mendalam maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi di lapangan. Selain itu juga penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah aktual dan kemudian data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan terhadap partai pendukung Haris-Sani yang lolos parlemen pada pilkada 2024 terkecuali partai PAN. Pertimbangan penulis

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Syakir Media Press, n.d.), 30.

meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Fokus dan Dimensi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis pemberian dukungan oleh 14 partai politik serta mencari tahu faktor penyebab pemberian dukungan oleh partai politik terhadap pasangan calon Haris-Sani 2024. Maka dimensi dari penelitian ini meliputi hubungan Patronase dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi dukungan yang dimiliki Haris-Sani dengan partai politik dalam pilkada serentak 2024 Provinsi Jambi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data dasar yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi objek penelitian, atau seluruh data penelitian yang diperoleh di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil penulis berupa dokumen, literatur dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari orang, situasi/peristiwa, dokumen, dan dokumen. Sumber data manusia adalah perkataan orang yang dapat memberikan data melalui wawancara. Sumber data

berupa atmosfer/peristiwa yang berupa pergerakan atau atmosfer kebahasaan, meliputi ruang, atmosfer, dan proses.

5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Teknik penentuan dalam penelitian ini adalah *Snowball sampling*.

a. *Snowball Sampling*

Metode sampling merupakan metode yang dipakai buat memastikan sampel. Jadi, suatu riset yang baik haruslah mencermati serta memakai suatu metode dalam menetapkan sampel yang hendak diambil untuk dijadikan subjek riset. *Snowball Sampling* ialah salah satu tata cara dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini merupakan metode non *probability sampling* (sampel dengan probability yang tidak sama)¹⁵

Dimana tata cara pengambilan sample semacam ini spesial digunakan untuk data-data yang bertabat komunitas dari subjektif responden/sampel, ataupun dengan kata lain objek sampel yang kita mau sangat sangat jarang serta bertabat mengelompok pada sesuatu Himpunan. Dengan kata lain *snowball sampling* tata cara pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi tingkat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang yang memilik jabatan dan masyarakat sekitar, seperti pada tabel berikut:

¹⁵ Ika Lenaini and Riwayat Artikel, "TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING INFO ARTIKEL ABSTRAK" 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/10.31764/historis.vxiY.4075>.

Tabel 1. 2 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Edi Purwanto	Ketua Umum DPD PDIP Jambi
2	Eko Supryatno	Wakil Sekretaris DPW PKB Jambi
3	Ahmad Fauzi Anshori	Ketua Bapillu Demokrat Jambi
4	Ahmad Said	Wakil Sekretaris PPP Jambi Wakil
5	Afrial	Sekretaris DPW PKS Jambi
6	Arman Siregar	Wakil Sekretaris DPD Gerindra
7	Ahmad Syauqi	Staff Ahli DPW Golkar Jambi
8	Citra Darminto	Pengamat Politik

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik, namun teknik-teknik berikut ini akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara *In Depth Interview*

Wawancara mendalam yakni wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan ide-ide dan pandangan tentang permasalahan yang diteliti secara terbuka sehingga peneliti hanya perlu mendengarkannya dengan teliti dan mencatat informasi yang disampaikan. Dengan tipe wawancara seperti ini maka peneliti juga dapat untuk memunculkan pertanyaan baru secara spontanitas yang sesuai dengan konteks pembicaraan sangat mungkin untuk dilakukannya. Wawancara ini dilakukan guna mencari tahu penyebab pemberian dukungan terhadap paslon Haris-Sani oleh banyak parpol.

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam tulisan maupun dokumen lainnya

seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sedang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal hal yang pokok, memfokuskan hal hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.¹⁶

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan data dengan sistematis sesuatu dengan yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagian hasil dari kesimpulan atau verifikasi.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta* (Bandung:Alfabeta, 2022), hlm 247

¹⁷ *Ibid*, hlm 249

8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data. Dalam Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Partai Politik Pendukung Alharis-Sani yang Lolos Parlemen

2.1.1 Partai Golongan Karya (Golkar)

Sejarah Partai Golkar

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak tahun 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini terwujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada tahun 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal di dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan dapat mewakili keterwakilan kolektif sebagai bentuk 'demokrasi' yang khas Indonesia. Wujud 'demokrasi' inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Pada awal berdirinya, Golkar bukanlah mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.

Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar menjadi partai politik untuk melawan PKI. Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang bermusuhan dengan partai tersebut runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka kesegaran politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga memperoleh 236 dari 360 kursi anggota DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapat 6,9 n Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar Didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.¹⁸

Visi Misi Partai Golkar

Visi

- Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, masa kini, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus dalam pergaulan dunia¹⁹.

Misi

- Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mewujudkan proklamasi cita-cita melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya perdamaian dan perdamaian dunia.

¹⁸ Golkar, "Sejarah Partai Golkar," accessed December 13, 2024, <https://www.partaigolkar.com/profil>.

¹⁹ "Visi Misi Partai Golkar," n.d., <https://golkarbali.com/visi-misi-partai-golkar/>.

- Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Logo Partai Golkar



Gambar 2. 1 Partai Golkar

1. Pohon beringin berarti melindungi yang berarti Partai Golkar memberiperlindungan bagi rakyat Indonesia.
2. Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.
3. Perisai segi lima melambangkan ideologi parta, yakni Pancasila.
4. Warna putih pada perisai bermakna kesucian.
5. Warna dasar kuning bermakna kejayaan. 17 bunga kapas, 8 akar gantung padaberingin dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia 17-8-45²⁰

²⁰ Golkar, "Sejarah Partai Golkar."

2.1.2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sejarah Partai PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki sejarah panjang yang dihapus dari penggabungan lima partai politik pada masa Orde Baru. Pada 10 Januari 1973, pemerintah mengkomunikasikan sistem multipartai dengan menggabungkan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, PDI sering menghadapi tekanan politik dari rezim Orde Baru, termasuk intervensi dalam kepemimpinan partai. Konflik di dalamnya memuncak pada tahun 1996 ketika pemerintah mendukung kubu Soerjadi melawan Megawati Soekarnoputri, putri Proklamator Sukarno, yang menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme²¹.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Megawati mendirikan PDIP pada 10 Januari 1999 sebagai transformasi dari PDI. Penambahan kata “Perjuangan” mencerminkan semangat baru untuk memperjuangkan demokrasi dan hak rakyat. PDIP segera meraih kesuksesan besar dengan memenangkan Pemilu 1999, pemilu pertama di masa reformasi, meskipun Megawati hanya menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2001, Megawati akhirnya menjadi Presiden Indonesia setelah dilengserkan Abdurrahman Wahid²².

²¹ “Sejarah Partai PDI,” diakses April 4, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan/>.

²² Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, “Dilihat pada <https://dprd.batam.go.id/partai-pdip-new/>.”

Namun, perjalanan PDIP tidak selalu mulus. Setelah kekalahan pada Pemilu 2004 dan 2009, partai ini bangkit kembali pada Pemilu 2014 dengan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Keberhasilan Jokowi memenangkan dua periode pemilu presiden (2014 dan 2019), menjadikan PDIP sebagai partai dominan di pemerintahan. Hingga kini, PDIP tetap menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia dengan ideologi nasionalisme dan Pancasila sebagai landasan perjuangannya.

Visi Misi Partai PDIP

Visi

- Mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945;
- Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai, dan sebagai cermin dari jati diri partai;
- Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat setidaknya bagi peralihan cita-cita bersama bangsa di atas

Misi

- Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;

- Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur;
- Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;
- Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik ekonomi sosial dan budaya secara demokratis dan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan mewujudkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa;
- Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara
- Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- Menghimpun membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila, dan;
- Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara²³

²³ "Sejarah Partai PDI."

Logo Partai PDIP



Gambar 2. 2 Partai PDI Perjuangan

- Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat;
- Warna dasar merah melambangkan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat;
- Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam perjuangan;
- Moncong putih melambangkan dapat percaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
- Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus²⁴.

2.1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sejarah Partai Gerindra

²⁴ Puger Ponda Tetuko, "Makna Logo PDIP, Banteng Berwarna Hitam Dengan Latar Warna Merah," n.d., <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/09/makna-logo-pdip-banteng-berwarna-hitam-dengan-latar-warna-merah>.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) didirikan pada 6 Februari 2008 sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Partai pendiri ini diprakarsai oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo, yang prihatin terhadap dampak kapitalisme yang merugikan rakyat kecil. Nama “Gerindra” diusulkan oleh Hasyim, sementara Prabowo Subianto, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar, mendorong lambang kepala burung garuda sebagai simbol keberanian dan kemandirian. Partai Deklarasi dilakukan dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, demokratis, dan berlandaskan Pancasila²⁵.

Pada Pemilu 2009, Gerindra berhasil memperoleh 26 kursi di DPR dengan perolehan suara sebesar 4,46%. Sejak itu, partai ini terus berkembang menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Pada Pemilu 2014 dan 2019, Gerindra mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kursi di parlemen masing-masing menjadi 73 dan 78 kursi. Terakhir, pada Pemilu 2024, Gerindra memperoleh 86 kursi, menjadikannya partai terbesar kedua di Indonesia. Prabowo Subianto memainkan peran sentral dalam perjalanan partai ini sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum sejak 2014²⁶.

Visi Misi Partai Gerindra

Visi

²⁵ “Sejarah Partai Gerindra,” accessed April 9, 2025, <https:// Gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>.

²⁶ Dewi Rizki Ayu, “Sejarah Prabowo Mendirikan Partai Gerindra, Pernah Diejek Dan Dihina,” accessed April 9, 2025, <https://www.tempo.co/politik/sejarah-prabowo-mendirikan-partai-gerindra-pernah-diejek-dan-dihina-1206956>.

- Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandasi diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri melebihi kaki sendiri dalam bidang ekonomi²⁷.

Misi

- Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan terus berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk terciptanya keberlanjutan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak berdosa dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan²⁸.

²⁷ "Visi Misi Gerindra," accessed April 9, 2025, <https:// Gerindra.id/visi-misi/>.

²⁸ "Visi Misi Gerindra."

Logo Partai Gerindra



Gambar 2. 3 Partai Gerindra

- Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengahnya terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah.
- Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam mengambil tindakan.
- Kepala Burung Garuda pada refleksinya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbolkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.
- Di atasnya tertulis PARTAI berwarna hitam, di bawahnya tertulis GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam²⁹.

²⁹ "Makna Lambang Gerindra," n.d., <https://gerindra.id/makna-lambang/>.

2.1.4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sejarah Partai PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Didirikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU) di tengah masa transisi politik Indonesia menuju masa Reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Pendiri utama PKB antara lain adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi. Pembentukan partai ini merupakan respon atas banyaknya usulan dari warga NU di berbagai daerah yang menginginkan wadah politik untuk menyalurkan aspirasi mereka, meskipun PBNU awalnya berhati-hati karena NU secara resmi tidak terlibat dalam politik praktis berdasarkan keputusan Mukhtamar NU 1984³⁰.

Pembentukan PKB melibatkan pertemuan-pertemuan penting, seperti rapat para kiai di Rembang yang dipimpin oleh KH Cholil Bisri dan konferensi besar di Bandung yang membahas nama dan panggung partai. Nama "Partai Kebangkitan Bangsa" akhirnya dipilih di antara beberapa alternatif. Deklarasi resmi PKB dilakukan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998, yang menandakan kesiapan partai ini untuk mengikuti Pemilu 1999. Pada pemilu tersebut, PKB berhasil meraih sekitar 12,62% suara nasional dan 51 kursi di DPR, prestasi yang mengagumkan bagi partai baru dan menunjukkan pengaruh besar Gus Dur dan NU di masyarakat.

Sejak itu, PKB mengalami dinamika dalam perolehan suara dan kursi di parlemen, dengan penurunan pada pemilu 2004 dan 2009, lalu bangkit kembali

³⁰ "Sejarah PKB," n.d., <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-partai-kebangkitan-bangsa-pkb/>.

pada pemilu 2014 dan 2019. PKB berperan penting dalam politik nasional, seperti mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk keberhasilan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. PKB tetap juga menjadi partai yang mewakili aspirasi umat Islam Nahdliyin dan ikut aktif dalam sistem demokrasi Indonesia.

Visi Misi Partai PKB

Visi

- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, materi dan spritual ;
- Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah³¹.

Misi

- **Bidang Ekonomi:**menegakkan dan mengembangkan kehidupan kerakyatan ekonomi yang adil dan demokratis;
- **Bidang Hukum:**berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

³¹ "Visi Misi PKB," accessed April 9, 2025, <https://pkb.id/page/visi-misi/>.

- **Bidang Sosial Budaya:**berusaha membangun budaya yang maju dan masa kini dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- **Bidang Pendidikan:**berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- **Bidang Pertahanan:**membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha perlindungan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari swasta-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

Logo Partai PKB



Gambar 2. 4 Partai PKB

1. Arti Gambar adalah sebagai berikut:

- Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah diskusi Indonesia yang merupakan premis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai;

- Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesetaraan, keseimbangan, dan persaudaraan;
- Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kemauan menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, kain dan dunia lain, lahir dan batin, secara sejajar.

2. Arti warna adalah sebagai berikut:

- Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- Kuning, menandakan kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.
- Asas dan Prinsip Perjuangan (menggantikan Tugas dan fungsi)
- Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Prinsip perjuangan PKB adalah

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.³²

2.1.5. Partai Demokrat

Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001 sebagai respons atas kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilihan wakil presiden pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001. Meskipun SBY tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari pembentukan partai karena masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ia aktif memimpin rapat strategi, membentuk garis besar, panggung, serta simbol partai. Pembentukan partai ini diprakarsai oleh para pendukung SBY, termasuk Vence Rumangkang yang memimpin proses administrasi dan konsep pendirian partai.

Partai Demokrat resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM pada 10 September 2001 dengan 99 pendiri, yang angka tersebut mewakili tanggal lahir SBY, yakni 9 September. Pada awalnya, Prof. Subur Budhisantoso menjabat sebagai ketua umum sementara, dan partai ini dideklarasikan secara resmi pada 17 Oktober 2002 di Jakarta. Partai Demokrat dibentuk oleh kalangan intelektual dan

³² "Makna Lambang PKB," accessed April 20, 2025, <https://pkb.id/page/makna-lambang/>.

akademisi yang ingin menghadirkan kekuatan politik baru di Indonesia pasca krisis ekonomi dan periode reformasi.³³

Sejak mengikuti Pemilu Legislatif 2004, Partai Demokrat langsung meraih posisi signifikan dengan 7,45% suara nasional dan 57 kursi di DPR. Puncak kejayaan partai terjadi pada Pemilu 2009 ketika berhasil menjadi pemenang dengan 20,4% suara dan 150 kursi di DPR. Partai ini terus berperan aktif dalam politik nasional, dan pada Kongres ke-V tahun 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra SBY, terpilih sebagai Ketua Umum partai untuk periode 2020–2025.

Visi Misi Partai Demokrat

Visi

- Partai Demokrat bersama masyarakat luas ikut mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.³⁴

Misi

- Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara ideal dengan peranan yang signifikan dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru

³³ "Sejarah Partai Demokrat," accessed April 17, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-partai-demokrat/>.

³⁴ "Visi & Misi Fraksi Demokrat," accessed April 17, 2025, <https://fpd-dpr.com/index.php/visi-misi>.

yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat untuk upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan;

- Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, menyusun Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki masa reformasi;
- Memperjuangkan tegaknya persamaan hak kewajiban dan warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi perlindungan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan

Logo Partai Demokrat



Gambar 2. 5 Partai Demokrat

- Bintang bersinar tiga melambangkan tiga kesatuan wawasan partai yang tidak dapat dipisahkan, yaitu nasionalis-religius, humanisme, dan pluralisme. Pucuk atas bintang melambangkan nasionalis-religius, kaki pertama humanisme, dan kaki kedua pluralisme;
- Warna biru laut melambangkan kesejukan dan kedamaian dalam kehidupan, serta samudera yang luas yang menjadi simbol akhir aliran berbagai sungai yang menyatu dengan kedamaian. Warna biru tua menandakan sikap tegas, mantap, percaya diri, dan optimisme;
- Warna merah putih pada bintang melambangkan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia;
- Tulisan "Partai Demokrat" di bawah simbol menegaskan identitas partai tersebut;
- Secara keseluruhan, simbol ini menggambarkan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mampu menghimpun seluruh warga negara untuk hidup

berdampingan secara damai dan saling menghormati dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan³⁵.

2.1.6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sejarah Partai PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi atau penggabungan partai politik Islam. Penggabungan itu terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Terbentuknya PPP dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang menghendaki penyederhanaan sistem kepartaian, sehingga partai-partai Islam tersebut melebur menjadi satu wadah yang dikenal sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Pada masa awal berdirinya, PPP menggunakan asas Islam dan menjadikan Kabah sebagai lambang partai. Namun, pada tahun 1984, di bawah tekanan politik Orde Baru, PPP terpaksa mengganti asasnya menjadi Pancasila dan mengubah lambang partai sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu³⁶

Setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998, PPP kembali ke asas Islam dan mengembalikan lambang Kabah sebagai simbol partai, namun tetap menegaskan komitmennya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam perjalanannya, PPP menjadi salah satu partai

³⁵ Vidi Batolone, “Pendiri Partai Demokrat Tegaskan SBY Pengagas Lambang “Bintang Segi Tiga Merah Putih,” n.d., <https://www.kompas.tv/nasional/164732/pendiri-partai-demokrat-tegaskan-sby-pengagas-lambang-bintang-segi-tiga-merah-putih>.

³⁶ “Sejarah Singkat PPP,” accessed April 25, 2025, <https://ppp.or.id/2021/12/06/sejarah-singkat-ppp/>.

politik utama di Indonesia, terutama dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam di bidang politik. PPP aktif dalam berbagai dinamika politik nasional, termasuk menjadi bagian dari Poros Tengah pada Sidang Umum MPR 1999 yang berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Hingga kini, PPP tetap eksis meski menghadapi tantangan internal dan eksternal, serta perubahan peta politik nasional pasca-Reformasi.

Visi Misi Partai PPP

Visi

- Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman.³⁷

Misi

Misi PPP meliputi beberapa poin utama yang dihapuskan pada nilai-nilai Islam dan Kebangsaan, yaitu:

- Berkhidmat untuk mewujudkan dan membina manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan saling kehidupan beragama, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim);

³⁷ "Profil PPP," accessed April 17, 2025, <https://ppp.or.id/2021/12/06/visi-misi-ppp/>.

- Berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, terutama ajaran Islam, serta mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia);
- Berkhidmat untuk memelihara rasa aman, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa);
- Mengedepankan peran agama sebagai pedoman etika dan sumber inspirasi dalam kehidupan bernegara, dengan hubungan yang simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, berpegang pada prinsip keharmonisan antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, serta komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama;
- Memperkuat kelembagaan, mekanisme, dan budaya politik yang demokratis dan berakhlak mulia (akhlaqul karimah) demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, menjunjung tinggi HAM, serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi;
- -Berkomitmen pada tegaknya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan institusi penegak hukum, serta penegakan hukum nasional;
- Menekankan konsep ekonomi kerakyatan, keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa;

- Berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius, bermoral, toleran, menjunjung tinggi persatuan, taat hukum, kritis, kreatif, mandiri, serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, etika, dan agama dunia lain;
- Berkomitmen pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan merata.

Logo Partai PPP



Gambar 2. 6 Partai PPP

Simbol Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berupa gambar Ka'bah memiliki makna simbolis yang sangat penting. Ka'bah dipilih sebagai lambang karena merupakan simbol pemersatu umat Islam, menggambarkan kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam beribadah kepada Allah SWT, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan. Sejarah penggunaan simbol Ka'bah ini cukup panjang dan penuh perjuangan. Sejak berdiri pada tahun 1973, PPP mengusulkan Ka'bah sebagai lambang partai, meskipun sempat diganti menjadi bintang segi lima pada masa Orde Baru (1984-1998) karena tekanan politik yang mewajibkan partai menggunakan asas Pancasila. Setelah reformasi, PPP kembali menggunakan

lambang Ka'bah sebagai simbol identitas dan perjuangan partai yang disingkirkan pada nilai-nilai Islam.³⁸

Selain Ka'bah, pada simbol baru PPP yang diperkenalkan sekitar tahun 2021, terdapat tambahan elemen seperti ikat kepala berwarna merah putih di belakang Ka'bah. Ikat kepala merah putih melambangkan ukhuwah wathoniyah, yaitu persaudaraan bangsa yang mencintai dan berjuang untuk kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Warna hijau melambangkan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Semboyan "merawat persatuan dengan pembangunan" juga tercantum sebagai filosofi perjuangan PPP.

2.1.7. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sejarah PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bermula dari Gerakan Tarbiyah, sebuah gerakan dakwah di kalangan pelajar yang mulai berkembang pada tahun 1990-an di Indonesia. Gerakan ini membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998, pasca lengsernya rezim Soeharto. PK awalnya berhasil meraih kursi legislatif dalam Pemilu 1999 dengan memperoleh 1,4 juta suara dan 7 kursi di DPR RI, serta beberapa kursi di DPRD provinsi dan kabupaten, dan juga menempatkan satu kadernya sebagai menteri dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun,

³⁸ Sultoni, "Mengulik Makna Tersirat Di Balik Perubahan Logo PPP," n.d., <https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/63bb3bd008a8b533cd62bc02/mengulik-makna-tersirat-dibalik-perubahan-logo-ppp>.

karena tidak memenuhi ambang batas parlemen (*electoral* ambang batas) sebesar 2%, PK tidak dapat mengikuti Pemilu 2004. Untuk mengatasi hal ini, PK kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 20 April 2002 di Jakarta dan diumumkan sebagai partai politik berbadan hukum pada tahun yang sama. Pada tanggal 3 Juli 2003, PK bergabung secara resmi dengan PKS sehingga hak seluruh dan kader PK menjadi bagian dari PKS³⁹

Sejak Pemilu 2004, PKS berhasil lolos ambang batas parlemen dan menjadi partai yang mengirimkan wakilnya ke DPR/MPR RI. PKS juga turut berpartisipasi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengisi beberapa posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Namun, setelah Pemilu dan Pilpres 2014, PKS berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berperan sebagai partai oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pada Musyawarah Nasional V November 2020, PKS menetapkan kepemimpinan baru periode 2020-2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden partai. Kepemimpinan baru ini mengusung visi PKS sebagai partai yang rahmatan lil alamin dengan beberapa perubahan simbol dan identitas partai. PKS tetap menjadi partai politik nasional yang aktif dalam kancah politik Indonesia hingga saat ini.

³⁹ "Sejarah Partai Keadilan Sejahtera," accessed April 30, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-keadilan-sejahtera-pks/>.

Visi Misi Partai PKS

Visi

- Menjadi Partai Islam rahmatan lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Misi

- Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk mewujudkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
- Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai masa kini untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
- Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat strategi kemitraan di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.
- -Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggalang dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi,

⁴⁰ "Visi Misi PKS," accessed April 17, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-keadilan-sejahtera-pks/>.

dan nepotisme, serta ikut berperan dalam pengembangan posisi demokrasi di daerah, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh Indonesia.

Logo Partai PKS



Gambar 2. 7 Partai PKS

Simbol Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbentuk bulat dengan dominan warna oranye, putih, dan sedikit hitam memiliki makna baru yang filosofis yang mendalam. Bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia berlandaskan Pancasila. Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, semangat hidup yang optimistis, dan semangat muda, sedangkan warna putih melambangkan kebersihan, kesucian, ketulusan, keikhlasan, dan kesejahteraan. Warna hitam menunjukkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, kewibawaan, kepastian, aspirasi, dan perlindungan. Simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus dalam simbol yang melambangkan nilai-nilai adil, ukhuwah (persaudaraan), istikamah (konsistensi), keberanian, disiplin dalam menjalankan tugas, serta ketegasan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Bulan sabit yang ada melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, dan keluhuran Islam sebagai penjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan simbol ini merupakan bagian dari rebranding PKS agar tampil lebih segar, maju, dan inklusif, dengan tujuan mendekatkan diri kepada semua kalangan masyarakat tanpa kecuali, termasuk generasi milenial dan perempuan. Simbol baru ini juga menandai semangat baru PKS dalam perjalanan berbangsa dan bernegara serta komitmen untuk meningkatkan perolehan suara dalam pemilu mendatang. Singkatan "PKS" yang kini tampil lebih sederhana menggantikan tulisan panjang "Partai Keadilan Sejahtera" pada simbol lama, menegaskan identitas partai yang masa kini dan mudah dikenal. Simbol baru ini juga menghilangkan elemen Ka'bah yang ada pada simbol lama, menandai perubahan simbol yang lebih luas dan inklusif⁴¹

2.2. Deskripsi Umum Provinsi Jambi

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45° – 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10° – 104,55° Bujur Timur. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno

⁴¹ Dilihat pada <https://www.pksriau.or.id/makna-dan-filosofi-lambang-baru-pks/>, Diakses pada Rabu 30 April 2025

BKRD (Badan Kongres Rakyat Djambi) dan membentuk provinsi sendiri.

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timurnya : Berbatasan dengan Selat Berhala.
5. Luas wilayah Provinsi Jambi $49.026,58\text{km}^2$ yang terdiri dari 11 kabupaten. Adapun luas kabupaten yang ada di provinsi Jambi sebagai berikut. ⁴²

- Kerinci $3.445,20\text{ km}^2$ (7,03)
- Merangin $7.540,12\text{ km}^2$ (15,38)
- Sarolangun $5.935,89\text{km}^2$ (12,11)
- Batang Hari $5.387,52\text{ km}^2$ (10,99)
- Muaro Jambi $5.225,80\text{km}^2$ (10,66)
- Tanjung Jabung Timur $4.546,62\text{km}^2$ (9,27)
- Tanjung Jabung Barat $5.546,06\text{km}^2$ (11,31)
- Tebo $6.103,74\text{km}^2$ (12,45)
- Bungo $4.760,83\text{km}^2$ (9,71)
- Kota Jambi $169,89\text{km}^2$ (0,35)

⁴² "Profil Perkembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi," n.d., <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-jambi/>.

- Kota Sungai Penuh 364,92 km² (0,74)⁴³

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020–2050, jumlah penduduk Provinsi Jambi pada akhir tahun 2024 mencapai 3.795.579 jiwa. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,33 persen per tahun, atau bertambah sekitar 176 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sekitar 641.022 jiwa pada pertengahan tahun 2024⁴⁴. Pertumbuhan penduduk ini sejalan dengan dinamika pembangunan dan urbanisasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Selain Kota Jambi, daerah lain dengan jumlah penduduk besar adalah Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, dan Bungo. Sementara itu, Kota Sungai Penuh merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang sedikit. Secara umum, peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

2.3. Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jambi

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2024 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. KPU

⁴³ Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2024, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jambi--2024.html>, (Diakses pada Selasa 6 Mei 2024)

⁴⁴ Nenang Mairiadi, "Penduduk Jambi Bertambah 176 Ribu, Sehingga Total 3,7 Juta Jiwa," n.d., <https://jambi.antaranews.com/berita/571638/penduduk-jambi-bertambah-176-ribu-sehingga-total-37-juta-jiwa>.

Provinsi Jambi mempersiapkan seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, pendaftaran pasangan calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan peraturan KPU terbaru. Dalam pelaksanaannya, KPU juga mengatur lembaga pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan untuk menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat luas dalam pengawasan proses pemilihan.

Untuk Pilgub Jambi 2024, terdapat dua calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung. KPU Provinsi Jambi telah menyiapkan sekitar 6.391 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 11 kabupaten/kota dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 2.695.348 orang. Persiapan pemilihan logistik sudah mencapai 95 persen dan distribusi logistik dijadwalkan mulai H-3 sebelum hari pencoblosan agar sampai tepat waktu di seluruh TPS, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. KPU juga memastikan pelaksanaan kampanye dan tahapan lainnya berjalan sesuai jadwal dan aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024 dimenangkan oleh pasangan petahana Al Haris dan Abdullah Sani (Haris-Sani). Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, pasangan Haris-Sani memperoleh 1.092.823 suara atau sekitar 61,01 persen dari

total suara sah. Sementara itu, pasangan lawannya, Romi Hariyanto dan Sudirman, memperoleh 698.265 suara atau 38,99 persen suara sah⁴⁵.

Rincian Suara dan Distribusi Wilayah :

1. Total pengguna hak pilih:1.967.070
2. Suara sah:1.791.088
3. Suara tidak sah:175.982

Pasangan Haris-Sani unggul di 10 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Satu-satunya wilayah yang dimenangkan oleh Romi-Sudirman adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur⁴⁶.

Tabel 2. 1 Perolehan suara di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Romi-Sudirman	Alharis-Sani
Kota Jambi	122.069	136.761
Muaro Jambi	88.841	127.878
Batanghari	49.875	88.234
Sarolangun	40.326	109.397
Merangin	49.730	139.294
Kerinci	62.408	81.743
Sungai Penuh	18.941	33.542
Tebo	58.701	110.421
Bungo	68.296	113.114
Tanjab Barat	58.207	99.198
Tanjab Timur	80.871	53.241

Sumber: DetikSumbagsel

⁴⁵ Nenang Mairiadi, "KPU Provinsi Jambi Segera Tetapkan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024," n.d., <https://jambi.antaranews.com/berita/600606/kpu-provinsi-jambi-segera-tetapkan-gubernur-terpilih-hasil-pilkada-2024>.

⁴⁶ Ferdi Almunanda, "Menang Di 10 Daerah, Al Haris-Sani Raih 1.092.823 Suara Di Pilgub Jambi," n.d., <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7677520/menang-di-10-daerah-al-haris-sani-raih-1-092-823-suara-di-pilgub-jambi>.

Paslon Al Haris-Sani unggul di 10 dari 11 kabupaten/kota, sedangkan Romi-Sudirman hanya menang di Tanjung Jabung Timur. Hasil ini telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jambi dan akan disampaikan kepada KPU RI serta DPRD Provinsi Jambi untuk menetapkan pasangan resmi terpilih.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Dukungan Banyak Partai Politik Terhadap Paslon Alharis-Sani Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di Provinsi Jambi

Syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 yang merevisi PKPU sebelumnya. Salah satu syarat utama adalah dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas suara sah dari jumlah hingga daftar pemilih tetap (DPT) di provinsi terkait. Batas ini disesuaikan berdasarkan jumlah DPT, mulai dari negligible 10% untuk provinsi dengan DPT hingga 2 juta jiwa, hingga 6,5% untuk provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa. Selain itu, dukungan tersebut harus disebarakan di lebih dari 50% kecamatan di wilayah provinsi terkait. Selain persyaratan dukungan partai politik, calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga harus memenuhi persyaratan pribadi yang meliputi kewarganegaraan Indonesia, berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan berusia rendah 30 tahun pada saat menentukan calon pasangan. Calon juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesehatan jasmani dan rohani calon harus dinyatakan baik dan bebas dari sudut pandang narkoba berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

Selain itu, calon tidak boleh pernah terpidana dengan hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, kecuali untuk tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik

dengan syarat telah melewati lima tahun sejak selesai menjalani pidana. Calon juga belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Persyaratan administrasi seperti legalisir ijazah dan dokumen pendukung lainnya juga wajib dipenuhi saat pendaftaran. Secara keseluruhan, syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 mengedepankan aspek legalitas dukungan partai politik, kualifikasi pribadi calon, serta persyaratan administratif yang ketat untuk memastikan calon yang memenuhi standar konstitusional dan peraturan-undangan yang berlaku. Pendaftaran pasangan calon sendiri diadakan dibuka secara serentak pada 27-29 Agustus 2024 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada.

Pada Pilkada Provinsi Jambi, pasangan petahana Al Haris dan Abdullah Sani dalam Pilkada Jambi 2024 mendapatkan dukungan masif dari 14 partai politik, ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dapat di analisis. Penelitian ini mengungkap bagaimana hubungan relasi dan pertukaran sumber daya membentuk koalisi politik tersebut. Bagaimana dukungan diberikan oleh partai menjadi pertanyaan besar yang ingin di analisis. Berdasarkan teori yang disampaikan James C.Scoot memiliki 4 ciri ciri dari hubungan Patron-klien dimana dari 14 partai yang mendukung Paslon Alharis-Sani, 7 partai menjadi informan dalam penelitian ini yaitu partai Golkar Jambi,PDIP Jambi, Gerindra Jambi, PKB Jambi, Demokrat Jambi, PPP Jambi, PKS Jambi, ciri-ciri hubungan Patron-klien adalah Ketimpangan, Hubungan Resiprositas, Loyalitas, dan Hubungan Personal.

3.1.1. Ketimpangan

Ciri hubungan utama patron-klien yang berkaitan dengan ketimpangan adalah adanya kesinambungan atau ketidaksamaan (ketidaksetaraan) dalam pertukaran antara patron dan klien. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan yang nyata dalam hal kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan sosial antara kedua pihak, di mana patron memiliki sumber daya ekonomi yang jauh lebih banyak dibandingkan klien. patron berposisi sebagai pemberi barang, jasa, atau perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh klien untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan klien berada dalam posisi yang kurang mampu membalas sepenuhnya pemberian tersebut, sehingga menimbulkan rasa kewajiban dan ketergantungan. Ketimpangan ini juga menimbulkan hubungan yang bersifat asimetris, di mana patron memiliki kekuasaan dominan dan klien berada dalam posisi subordinat atau lebih rendah.

Meski demikian, hubungan ini tetap terpelihara karena adanya keuntungan timbal balik, meskipun dalam porsi yang tidak seimbang, serta adanya loyalitas dan rasa saling ketergantungan. Ketimpangan ini membuat hubungan patron-klien tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga personal dan informal, sehingga seringkali mengandung unsur paternalistik dan eksploitasi yang dimanusiakan oleh kedekatan emosional antara patron dan klien. Singkatnya, ketimpangan dalam hubungan patron-klien adalah perbedaan yang nyata dan disengaja dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kewajiban bola jasa, yang menyebabkan hubungan ini bersifat asimetris, di mana patron memegang posisi dominan dan klien bergantung secara ekonomi dan sosial.

Wawancara bersama bapak Edi Purwanto selaku Ketua Umum DPD PDIP

Provinsi Jambi mengatakan :

“Sebetulnya tidak adanya ketimpangan ekonomi atau sosial antara Al Haris dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Justru, PDIP secara resmi mengusung pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dalam Pilgub Jambi 2024 dengan alasan keinginan utama program pembangunan, komitmen kepada rakyat, dan dukungan terhadap kepentingan wong cilik (masyarakat kecil). Dukungan ini juga didasarkan pada hasil pengawasan dan mekanisme pihak dalam yang menempatkan Al Haris sebagai petahana yang layak diusung kembali. Dengan demikian, hubungan antara Al Haris dan PDIP lebih bersifat kemitraan politik yang strategis dan saling menguntungkan, bukan hubungan yang menunjukkan ketimpangan sosial atau ekonomi dalam konteks patron-klien. PDIP mendukung Al Haris sebagai bagian dari upaya keinginan pembangunan dan penguatan kebersamaan politik di Jambi, bukan sebagai dermawan yang menindas atau mengeksploitasi klien.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara bersama informan, diperoleh informasi terkait dengan apakah ada ketimpangan sosial politik ekonomi dan lain-lain antara Paslon Alharis-Sani dengan partai PDIP. Dari informasi tersebut dukungan PDIP sendiri tidak didasari adanya perbedaan dalam segi apapun, karena elektabilitas serta keiinginan keberlanjutan menjadi dasar pemberian dukungan oleh partai PDIP. Sebelum pemberian dukungan pasti dilakukan evaluasi ataupun rapat dimana untuk memutuskan hal tersebut. Sehingga bukan karna perbedaan atau ketimpangan, tapi karena paslon tersebut memiliki kriteria yang pas dengan partai PDIP sehingga dukungan tersebut diberikan.

Meskipun pernyataan resmi menyebutkan bahwa tidak terdapat ketimpangan ekonomi atau sosial antara Al Haris dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta menegaskan bahwa hubungan mereka adalah kemitraan

⁴⁷ Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto selaku Ketua Umum DPD PDIP Provinsi Jambi, Sabtu 3 Mei 2025

politik strategis yang saling menguntungkan, jika ditelaah lebih dalam, terdapat indikasi pola hubungan patronase yang melekat dalam dinamika politik tersebut. Pertama, dukungan PDIP terhadap Al Haris sebagai petahana yang diusung kembali tidak hanya didasarkan pada alasan program pembangunan dan komitmen kepada rakyat, melainkan juga pada mekanisme pengawasan internal partai yang mengatur siapa yang layak mendapatkan dukungan. Hal ini mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang asimetris, di mana PDIP sebagai patron memiliki otoritas untuk menentukan calon yang layak, sementara Al Haris sebagai klien bergantung pada keputusan partai untuk memperoleh legitimasi politik.

Kedua, dukungan PDIP terhadap kepentingan masyarakat kecil melalui Al Haris juga dapat dilihat sebagai strategi patronase, di mana PDIP menggunakan figur Al Haris untuk memperkuat basis dukungannya di kalangan masyarakat bawah. Dalam konteks ini, PDIP memegang kendali atas sumber daya politik dan akses terhadap program pembangunan, sementara Al Haris berperan sebagai perantara yang menghubungkan patron dengan klien di tingkat masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam hubungan ini terlihat dari distribusi sumber daya dan kekuasaan yang tidak seimbang. PDIP sebagai partai politik besar memiliki akses luas terhadap dana, jaringan politik, dan legitimasi, sedangkan Al Haris, meskipun petahana, tetap bergantung pada dukungan partai untuk mempertahankan posisi politiknya. Ketergantungan ini menciptakan hubungan patron-klien yang khas, di mana loyalitas dan dukungan politik klien menjadi imbalan atas akses dan sumber daya yang diberikan oleh patron.

Dengan demikian, meskipun secara formal hubungan antara Al Haris dan PDIP diposisikan sebagai kemitraan politik yang setara dan berorientasi pada pembangunan, secara substansial hubungan tersebut mengandung unsur patronase dengan indikator ketimpangan sosial dan ekonomi. Hubungan ini memperlihatkan pola pertukaran yang tidak seimbang dan ketergantungan yang menjadi ciri khas hubungan patron-klien dalam politik lokal.

Di internal DPW PKB wawancara bersama bapak Eko selaku wakil sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi mengatakan:

“Tentu dilihat dari potensi dalam konsep pemilihan ini yang dituju adalah sebuah kemenangan, dan tentu saja partai untuk mendukung siapa saja itu dilihat dari potensi, paslon Alharis-Sani memiliki potensi besar yang merupakan faktor dukungan terhadap beliau. Ketimpangan dari segi apapun tidak menjadi faktor dukungan partai PKB kepada paslon, jika berbicara politik secara luas tidak serta merta mengedepankan finansial, itu hanya bumbu-bumbu yang tidak menjadi pengaruh yang signifikan keputusan untuk mendukung itu”⁴⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dinamika pemilihan kepala daerah, kemenangan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap partai politik. Oleh karena itu, dalam menentukan dukungan, partai tentu mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh pasangan calon. Pasangan Alharis-Sani dinilai memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan, sehingga hal tersebut menjadi faktor utama yang mendorong partai, termasuk PKB, untuk memberikan dukungan. Potensi ini bisa dilihat dari rekam jejak, popularitas, hingga kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

⁴⁸ Wawancara Bersama Bapak Eko Selaku Wakil Sekeretaris DPW PKB Provinsi Jambi, 1 Mei 2025

Di sisi lain, ketimpangan dari segi apapun, baik finansial maupun faktor eksternal lainnya, tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dukungan oleh PKB. Dalam konteks politik yang lebih luas, aspek finansial hanya dianggap sebagai pelengkap dan bukan penentu utama. Keputusan untuk mendukung pasangan lebih calon didasarkan pada keyakinan terhadap kemampuan dan peluang pasangan tersebut untuk menang, bukan pada faktor-faktor yang bersifat sementara atau tidak substansial. Dengan demikian, dukungan PKB kepada paslon Alharis-Sani benar-benar didasarkan pada penilaian tujuan terhadap potensi kemenangan yang dimiliki.

Meskipun pernyataan resmi menyebutkan bahwa dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pasangan calon (paslon) Alharis-Sani didasarkan pada potensi kemenangan dan bukan pada ketimpangan finansial atau sosial, jika ditelaah lebih jauh, pola dukungan tersebut mengindikasikan adanya hubungan Patronase yang mengandung ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. PKB sebagai partai politik besar berperan sebagai patron yang memiliki kontrol atas sumber daya politik, jaringan, dan legitimasi yang dapat menentukan peluang kemenangan paslon. Dalam konteks ini, PKB memegang posisi dominan dalam relasi politik, sementara paslon Alharis-Sani sebagai klien bergantung pada dukungan partai untuk memperoleh akses ke sumber daya tersebut.

Meskipun secara eksplisit ketimpangan finansial dianggap bukan faktor utama, dalam praktik politik patronase, ketimpangan sumber daya baik finansial, jaringan, maupun akses terhadap alat kampanye menjadi indikator utama hubungan patron-klien. PKB menyediakan berbagai bentuk dukungan yang bersifat material

dan simbolis kepada paslon sebagai imbalan atas loyalitas dan komitmen politik yang akan mengamankan kemenangan partai. Keputusan PKB untuk mendukung paslon lebih dilihat sebagai strategi pragmatis untuk memenangkan kontestasi politik, yang pada dasarnya merupakan pertukaran kepentingan tidak setara. Paslon membutuhkan dukungan partai untuk menang, sementara partai membutuhkan paslon untuk memperkuat posisi politiknya di daerah. Ketergantungan ini menciptakan relasi asimetris yang menjadi ciri khas patronase politik. Dengan demikian, walaupun data resmi menegaskan bahwa dukungan PKB tidak didasarkan pada ketimpangan, realitas politik menunjukkan adanya hubungan patronase dengan indikator ketimpangan sumber daya dan kekuasaan. Hubungan ini memperlihatkan pola pertukaran yang tidak seimbang antara PKB sebagai patron dan paslon Alharis-Sani sebagai klien dalam dinamika politik Jambi 2024.

Di internal DPD Demokrat Provinsi Jambi wawancara bersama Bapak Dr.Ir. Ahmad Fauzi Ansori.M.T selaku ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILLU) partai Demokrat Jambi juga ketua Fraksi Demokrat mengatakan:

“Kalau ditanya ketimpangan antara partai dengan paslon ini merupakan hal yang normatif, kalau partai Demokrat dalam menentukan bakal calon ada mekanisme yang sesuai AD/ART partai. Partai Demokrat sendiri apabila mendekati pemilihan baik kabupaten/kota atau gubernur akan membuka pendaftaran penjangkaran kepala daerah, saat pilkada kemarin ada yang mendaftar selain pak Alharis. Tapi pak haris merupakan orang pertama yang mendaftarkan diri ke partai Demokrat. Sebenarnya tidak ada ketimpangan pasti calon kepala daerah tu ia memilih partai partai yang memiliki keterwakilan di DPR 20% yang kemarin belum ada putusan Mahkamah Konstitusi dan masih memakai undang-undang politik lama. Ketika paslon memutuskan untuk maju pada pemilihan kepala daerah harus siap dalam

segala hal sehingga beliau bisa memborong partai berarti logistiknya juga kuat.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ketimpangan antara partai politik dengan pasangan calon (paslon) dalam proses pencalonan merupakan hal yang normatif dan sudah menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai. Partai Demokrat, misalnya, memiliki prosedur yang jelas dalam menentukan calon kepala daerah melalui proses penjaringan yang terbuka menjelang pemilu, baik di tingkat kabupaten/kota maupun Gubernur. Pada Pilkada terakhir, selain Pak Alharis, ada beberapa calon yang mendaftar, namun Pak Alharis menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri ke Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencalonan berjalan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebenarnya, tidak ada ketimpangan yang signifikan karena calon kepala daerah biasanya memilih partai yang memiliki keterwakilan minimal 20% di DPR, sesuai dengan ketentuan undang-undang politik lama yang masih berlaku hingga ada keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Ketika calon pasangan memutuskan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, mereka harus siap menghadapi segala tantangan, termasuk aspek logistik dan dukungan politik. Jika seorang calon mampu memperoleh dukungan dari berbagai partai, hal ini juga menunjukkan kesiapan dan kekuatan logistik yang dimiliki, yang menjadi modal penting dalam memenangkan pemilihan.

Meskipun mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrat secara normatif sesuai AD/ART partai dan membuka peluang

⁴⁹ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fauzi Ansori Selaku Ketua Bapillu DPD Demokrat Provinsi Jambi, 19 Mei 2025

pendaftaran bagi berbagai calon, realitas politik menunjukkan adanya ketimpangan yang menjadi indikator hubungan patronase. Al Haris sebagai calon yang pertama mendaftar dan kemudian diusung, menandakan adanya keunggulan akses dan modal politik yang tidak dimiliki oleh calon lain. Hal ini menunjukkan ketimpangan dalam kemampuan logistik dan sumber daya yang dimiliki oleh calon, yang menjadi faktor utama dalam menentukan dukungan. Dalam konteks politik di Indonesia yang masih menggunakan aturan kuota keterwakilan DPR minimal 20%, calon kepala daerah harus memiliki kekuatan finansial dan jaringan politik yang kuat untuk bisa memborong partai.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan sumber daya antara calon yang mampu menyediakan logistik dan calon yang tidak, sehingga menciptakan hubungan patron-klien di mana calon dengan modal kuat seperti Alharis-Sani bergantung pada partai (patron yang mengendalikan akses politik). Ketergantungan calon pada partai politik sebagai patron yang memiliki kontrol atas legitimasi dan akses ke sumber daya politik menegaskan adanya relasi asimetris. Partai sebagai patron memberikan dukungan kepada calon yang mampu memenuhi kebutuhan logistik dan strategi kemenangan partai, sementara calon sebagai klien harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara formal proses penjaringan calon terlihat transparan dan normatif, secara substansial terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi indikator kuat hubungan patronase politik. Hubungan ini memperlihatkan pola pertukaran sumber daya dan kekuasaan yang tidak seimbang

antara Partai Demokrat sebagai patron dan Al Haris sebagai klien dalam dinamika politik Pilgub Jambi 2024.

Wawancara bersama bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW

PPP Provinsi Jambi mengatakan:

“Sebenarnya, proses dukungan PPP kepada pasangan Haris-Sani berjalan sangat umum dan berdasarkan aspirasi dari bawah, bukan karena adanya ketimpangan. Rekomendasi dukungan ini lahir dari hasil permusyawaratan DPC dan DPW PPP Jambi, yang kemudian direspon cepat oleh DPP PPP. Bahkan, surat rekomendasi untuk Haris-Sani yang pertama kali dikeluarkan secara nasional oleh DPP PPP, menandakan kuatnya aspirasi dan soliditas di internal partai. Dukungan ini bukan semata-mata administratif, tapi benar-benar kehendak rakyat dan kader PPP di Jambi. Tidak ditemukan ketimpangan atau perbedaan sikap yang signifikan antara PPP dan pasangan Haris-Sani. Dukungan PPP diberikan atas dasar aspirasi yang kuat dari kader dan masyarakat, serta pertimbangan keinginan pembangunan dan kekuatan koalisi yang kuat di Pilkada Jambi 2024.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dukungan PPP kepada pasangan Haris-Sani pada Pilkada Jambi 2024 merupakan hasil dari proses yang demokratis dan partisipatif. Proses ini berjalan secara umum, didasarkan pada aspirasi kader dan masyarakat dari tingkat bawah, serta melalui permusyawaratan di partai batin , mulai dari DPC, DPW, hingga DPP. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mendukung Haris-Sani bukanlah hasil dari adanya ketimpangan atau tekanan tertentu, melainkan murni kemauan dan aspirasi kolektif.

Selain itu, soliditas di dalam PPP tercermin dari cepatnya DPP merespons dan mengeluarkan surat rekomendasi, bahkan menjadi yang pertama secara nasional. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

⁵⁰ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi, 2 Mei 2025

mencerminkan komitmen kuat partai terhadap pembangunan dan perdamaian di Jambi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan PPP kepada Haris-Sani sangat kuat, didasari aspirasi yang kuat, serta menjadi cerminan keinginan kader dan masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Meskipun PPP kepada pasangan Haris-Sani diklaim sebagai hasil aspirasi dari bawah dan permusyawaratan internal yang solid, realitas politik menunjukkan adanya hubungan patronase yang ditandai oleh ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Pertama, rekomendasi dukungan yang cepat dan menjadi yang pertama dikeluarkan oleh DPP PPP secara nasional menandakan dominasi pusat (patron) dalam menentukan arah politik di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara DPP PPP sebagai patron yang memiliki otoritas kuat dan DPC/DPW yang lebih sebagai klien yang menyesuaikan diri dengan keputusan pusat. Kedua, meskipun dukungan tersebut diklaim sebagai aspirasi kader dan masyarakat, dalam praktik patronase politik, aspirasi tersebut seringkali dibentuk dan diarahkan oleh patron melalui mekanisme internal partai yang asimetris.

PPP sebagai patron menyediakan legitimasi politik dan akses sumber daya, sementara pasangan Haris-Sani sebagai klien bergantung pada dukungan partai untuk memperkuat posisi politiknya. Ketiga, hubungan ini juga mencerminkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya politik dan kekuasaan, di mana PPP mengontrol akses terhadap rekomendasi resmi dan dukungan logistik, sedangkan pasangan calon harus memenuhi ekspektasi dan kebutuhan patron untuk memperoleh dukungan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara formal dukungan PPP terlihat sebagai hasil aspirasi kolektif dan kehendak rakyat, secara

substansial hubungan ini memperlihatkan pola patronase dengan indikator ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Hubungan patron-klien ini menjadi strategi politik yang menguatkan posisi PPP sebagai patron dan pasangan Haris-Sani sebagai klien dalam Pilkada Jambi 2024.

Di internal DPW PKS Jambi Wawancara Bersama Bapak Afrial selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi mengatakan:

”Sebenarnya tidak ada pengaruh dari ketimpangan ataupun kesenjangan, dukungan PKS sendiri dikarenakan ada kesamaan visi misi partai dengan paslon Haris-Sani. Semua partai sama dan memiliki tujuan yang sama, maka dari itu dukungan PKS terhadap paslon Haris-Sani dilatar belakangi oleh tujuan yang sama”⁵¹

Dari wawancara diatas Pernyataan bahwa dukungan PKS terhadap pasangan Haris-Sani tidak dipengaruhi oleh ketimpangan ataupun ketidakseimbangan, melainkan karena adanya kesamaan visi dan misi, menegaskan bahwa proses politik yang terjadi berjalan secara rasional dan berdasarkan pertimbangan ideologis. PKS memandang bahwa seluruh partai politik, termasuk dirinya, memiliki tujuan yang sama dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk mendukung pasangan Haris-Sani lahir dari proses pertukaran dan penyesuaian visi-misi, bukan karena adanya tekanan, perbedaan, atau keterpaduan tertentu di antara partai politik yang terlibat.

Meskipun pernyataan resmi menyebut dukungan PKS terhadap pasangan Haris-Sani murni didasarkan pada kesamaan visi-misi, realitas politik menunjukkan

⁵¹ Wawancara Bersama Bapak Afrial Selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi, 21 Februari 2025

indikator kuat hubungan Patronase dengan ketimpangan sumber daya dan kekuasaan. PKS sebagai patron memiliki otoritas penuh dalam pemberian dukungan, termasuk mekanisme seleksi kandidat melalui desk pendaftaran. Proses ini menciptakan ketimpangan akses, di mana hanya kandidat dengan modal politik kuat seperti Haris-Sani (petahana) yang mampu memenuhi persyaratan. Dukungan PKS tidak bersifat netral, melainkan pertukaran kepentingan, PKS menyediakan legitimasi politik dan mesin partai termasuk mobilisasi kader dan struktur. Haris-Sani sebagai klien menyediakan sumber daya logistik dan elektabilitas untuk menjamin kemenangan partai .

Ketergantungan ini menciptakan relasi tidak setara, di mana paslon bergantung pada patron untuk akses kekuasaan. Rekomendasi dukungan diserahkan langsung oleh Presiden PKS, menegaskan dominasi pusat. PKS menggerakkan seluruh struktur partai, termasuk anggota DPRD dan Sekjen yang turun gunung menunjukkan kontrol ketat terhadap sumber daya mobilisasi. Mengapa Kesamaan visi menjadi narasi Patronase Pragmatisme Elektoral, PKS secara terbuka menyatakan dukungan didasarkan pada potensi kemenangan , bukan kesetaraan ideologis. Hanya kandidat dengan kapasitas logistik tinggi (seperti petahana) yang mampu memenuhi syarat memborong partai, mencerminkan ketimpangan kesempatan. Posisi PKS sebagai gatekeeper politik memaksa paslon tunduk pada mekanisme partai, mengorbankan otonomi kebijakan .

Di internal Gerindra Wawancara Bersama Bapak Arman Siregar Selaku

Wakil Sekretaris mengatakan:

“Sebenarnya, dukungan Gerindra kepada pasangan Haris-Sani bukan semata-mata karena faktor ketimpangan sosial ekonomi. Memang, persoalan kesenjangan itu ada di mana-mana dan menjadi perhatian kita bersama, namun keputusan kami lebih didasarkan pada faktor keinginan pembangunan dan kesesuaian visi misi pasangan ini dengan harapan masyarakat Jambi. Dukungan Partai Gerindra kepada pasangan Haris-Sani lebih didasarkan pada faktor keinginan pembangunan, kesesuaian visi politik, dan kemampuan pasangan dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk kesenjangan, bukan hanya karena adanya kesenjangan itu sendiri”⁵²

Dari wawancara diatas keputusan Partai Gerindra mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Al Haris dan Abdullah Sani dalam Pilkada Jambi 2024 didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Salah satu alasan utama adalah keinginan untuk melanjutkan pembangunan yang telah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi selama masa kepemimpinan Al Haris. Gerindra menilai keinginan pembangunan ini penting agar berbagai program dan proyek yang sudah dimulai dapat diselesaikan dengan baik demi kemajuan daerah. Selain itu, Al Haris juga merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), di mana Gerindra bersama Wadah dan Golkar berkoalisi, sehingga dukungan ini juga memperkuat sinergi politik di tingkat provinsi.

Meskipun Partai Gerindra menyatakan bahwa dukungannya kepada pasangan Haris-Sani bukan semata karena ketimpangan sosial ekonomi, kenyataannya terdapat ketimpangan kekuasaan yang menjadi indikator hubungan patronase. Gerindra sebagai patron memiliki kontrol penuh dalam menentukan

⁵² Wawancara Bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris DPW Gerindra Jambi, 21 Februari 2025

syarat dukungan, seperti kesesuaian visi dan keinginan pembangunan, yang hanya dapat dipenuhi oleh calon dengan modal politik dan sumber daya besar seperti Haris-Sani. Dalam hubungan ini, Gerindra menyediakan legitimasi politik dan jaringan kekuasaan, sedangkan Haris-Sani sebagai klien bergantung pada dukungan partai untuk mempertahankan posisi politiknya. Penekanan pada kesesuaian visi dan pembangunan sebenarnya menjadi alat kontrol patron atas kebijakan, sehingga Haris-Sani harus menyesuaikan diri dengan agenda partai. Dengan demikian, dukungan Gerindra mencerminkan pola patronase yang ditandai oleh ketimpangan akses, ketimpangan pertukaran sumber daya, dan ketimpangan naratif, yang memperkuat posisi patron dan membuat klien bergantung dalam dinamika politik Pilkada Jambi 2024.

Di internal DPW Golkar Jambi Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli mengatakan:

“Keputusan Golkar buat dukung Haris-Sani di Pilkada Jambi 2024 sebenarnya nggak lepas dari campur tangan para petinggi partai di pusat. Mereka ngasih instruksi yang harus diikuti semua kader, jadi suara dari daerah tidak terlalu terdengar. Akibatnya, kader yang sebenarnya punya peluang kayak Saniatul Lativa malah harus mundur karena keputusan dari atas, padahal dia didukung di daerahnya. Situasi kayak mulai nunjukin kalau kekuasaan di partai besar seperti Golkar masih didominasi sama keputusan elite dan jaringan orang kuat di pusat.”⁵³

Dari wawancara diatas Keputusan Partai Golkar untuk mendukung pasangan Haris-Sani dalam Pilkada Jambi 2024 tidak terlepas dari pengaruh kuat para partai elite di tingkat pusat. Instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat bersifat mengikat bagi seluruh kader, sehingga aspirasi dan suara dari tingkat

⁵³ Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi Selaku Staf Ahli DPW Golkar Jambi, 7 Mei 2025

daerah kurang mendapat ruang untuk didengar dan diperhitungkan secara ideal. Kondisi ini menyebabkan kader potensial seperti Saniatul Lativa harus runtuh karena keputusan yang diambil oleh pengurus pusat, meskipun ia memperoleh dukungan signifikan dari dasar di daerahnya.

Fenomena tersebut mencerminkan dominasi kekuasaan oleh elite dan jaringan pusat dalam pengambilan keputusan politik di partai besar seperti Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa proses internal partai masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan strategi yang ditetapkan oleh pimpinan pusat, sehingga suara kader di tingkat daerah seringkali kurang mendapat perhatian yang proporsional. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara aspirasi di akar rumput dengan kebijakan partai secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya pola Patronase dalam pengambilan keputusan dukungan partai Golkar kepada pasangan Haris-Sani, yang ditandai dengan dominasi elite pusat dalam menentukan calon tanpa melibatkan suara kader daerah secara signifikan. Dalam teori patronase, salah satu indikator ketimpangan adalah adanya asimetri kekuasaan di mana keputusan politik diambil oleh kelompok elite yang memiliki kontrol sumber daya dan jaringan kuat, sementara basis di daerah menjadi subordinat dan kehilangan suara dalam proses tersebut. Kasus kader seperti Saniatul Lativa yang harus mundur meskipun didukung di daerahnya mencerminkan ketergantungan dan subordinasi kader lokal terhadap keputusan patron pusat, memperlihatkan relasi vertikal-hirarkis khas patronase.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana jaringan elite dan kekuasaan terpusat mengontrol distribusi peluang politik, yang memperkuat ketimpangan sosial-politik dalam partai. Dalam konteks pernyataan tersebut, yang menjadi patron adalah para petinggi Partai Golkar di pusat, khususnya Ketua Umum DPP Golkar dan elite partai yang mengeluarkan instruksi dan rekomendasi resmi untuk mendukung pasangan Haris-Sani. Mereka memegang kendali atas keputusan politik dan mengarahkan seluruh kader partai untuk mengikuti arahan tersebut. Dengan demikian, keputusan Golkar ini mencerminkan praktik patronase yang memperkuat kesenjangan kekuasaan antara elite pusat dan kader daerah, bukan kemitraan politik yang egaliter.

3.1.2 Hubungan Resiprositas

Hubungan resiprositas adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling memberi dan menerima manfaat secara seimbang. Prinsip ini menekankan adanya pertukaran yang adil, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun perlakuan, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, resiprositas dapat ditemukan dalam berbagai interaksi sosial, mulai dari hubungan antarindividu di masyarakat hingga hubungan antarnegara di tingkat internasional.

Dalam praktiknya, hubungan resiprositas dapat berbentuk pertukaran langsung maupun tidak langsung. Pertukaran langsung terjadi ketika dua pihak saling memberi dan menerima secara langsung pada waktu yang hampir bersamaan, misalnya saling membantu antar tetangga. Sementara itu, pertukaran tidak langsung bisa melibatkan lebih dari dua pihak, di mana balasan atas bantuan atau pemberian

tidak selalu datang dari pihak yang sama dan dapat terjadi pada waktu yang berbeda, seperti dalam sistem gotong royong di masyarakat. Resiprositas juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kelanggengan hubungan sosial. Dengan adanya prinsip timbal balik, setiap pihak terdorong untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hubungan yang terjalin menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu, resiprositas dapat memperkuat solidaritas sosial dan membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat atau antarnegara.

Di internal PDIP Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum DPW PDIP Jambi yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jambi Mengatakan :

“Ya untuk hubungan timbal balik atau mencari keuntungan sendiri PDIP tidak berbicara tentang itu, karena PDIP itu mengikuti aturan partai bagaimana Jambi itu menjadi provinsi yang berdaulat dan menjadikan masyarakatnya yang sejahtera berdikari dan berdiri diatas ekonomi, bagaimana nanti Haris-Sani menjadikan provinsi dengan masyarakat yang berdaulat dan sejahtera dan menjadikan provinsi Jambi senagai provinsi yang aman, jadi ga ada keuntungan pribadi politik.”⁵⁴

Dari wawancara tersebut PDI Perjuangan menegaskan bahwa dalam meningkatkan Provinsi Jambi, partai tidak fokus pada hubungan timbal balik atau berusaha mencari keuntungan pribadi. Sikap PDIP didasarkan pada komitmen untuk mengikuti aturan dan garis kebijakan partai, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Tujuan utama PDIP adalah memastikan Jambi menjadi provinsi yang berdaulat, dengan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan mampu

⁵⁴ Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum PDIP Provinsi Jambi, 3 Mei 2025

berdiri di atas kekuatan ekonomi sendiri. Lebih lanjut, PDIP mendukung penuh kepemimpinan Haris-Sani dalam mewujudkan visi tersebut, yakni mewujudkan Provinsi Jambi yang aman, masyarakatnya berdaulat, dan sejahtera. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi kepentingan politik pribadi dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Semua kebijakan dan dukungan yang diberikan semata-mata bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jambi secara menyeluruh.

Meski PDIP menyatakan dukungannya kepada Haris-Sani bukan untuk keuntungan pribadi politik, melainkan berlandaskan visi membangun Jambi yang berdaulat dan sejahtera, analisis menunjukkan adanya hubungan patronase yang kuat dengan indikator resiprositas. Dalam hubungan ini, PDIP sebagai patron menyediakan legitimasi politik dan dukungan sumber daya kepada Haris-Sani sebagai klien yang diharapkan mewujudkan visi partai melalui pembangunan daerah. Hubungan timbal balik ini mencerminkan pola pertukaran di mana patron memberikan akses dan dukungan politik, sementara klien menjalankan agenda pembangunan yang menjadi kepentingan patron. Dengan demikian, meskipun data resmi menekankan tujuan bersama dan tanpa motif keuntungan pribadi, secara substansial hubungan PDIP dan Haris-Sani mengandung unsur patronase yang dibangun atas dasar resiprositas kepentingan politik dan pembangunan daerah.

Di internal DPW PKB wawancara bersama bapak Eko selaku wakil sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi mengatakan:

“Tentu hubungan timbal balik terjadi, keuntungan seperti keuntungan sosiologis kemudian keuntungan elektoral, alasnya kenapa karena pak Abdullah Sani merupakan ketua Dewan Suro di DPW PKB Jambi yah tu sebuah keuntungan yang kita dapat sebagai keuntungan elektoral karena siapa yang tidak ingin menjabat sebagai wakil gubernur, dan juga dukungan PKB ke paslon tersebut sebagai bentuk kesetiaan”⁵⁵

Dari wawancara di atas hubungan timbal balik antara calon wakil gubernur dan partai politik membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari sisi sosiologis, kedekatan tokoh seperti Pak Abdullah Sani yang menjabat sebagai Ketua Dewan Suro di DPW PKB Jambi memperkuat jaringan sosial dan dukungan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan dan solidaritas antara kandidat dan partai pendukung. Selain keuntungan sosiologis, hubungan ini juga memberikan keuntungan elektoral. Dengan posisi strategis Pak Abdullah Sani di PKB, peluang untuk memperoleh suara dari dasar pemilih PKB di Jambi semakin besar. Dukungan partai kepada pasangan calon tidak hanya meningkatkan elektabilitas, tetapi juga memperluas jangkauan kampanye dan memperkuat legitimasi kandidat di mata pemilih.

Dukungan PKB kepada pasangan calon merupakan bentuk kesetiaan partai terhadap kadernya yang maju dalam pilkada. Ingin menjabat sebagai wakil gubernur menjadi motivasi tambahan bagi kandidat, partai sementara memperoleh keuntungan dengan menempatkan kadernya pada posisi strategis pemerintahan.

⁵⁵ Wawancara Bersama Bapak Eko Selaku Wakil Sekeretaris DPW PKB Provinsi Jambi, 1 Mei 2025

Sinergi ini menciptakan hubungan saling menguntungkan yang memperkuat posisi kedua pihak dalam kontestasi politik.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam konteks politik di Jambi, terjadi hubungan timbal balik (resiprositas) yang memberikan keuntungan sosiologis dan elektoral bagi para aktor politik, khususnya terkait posisi Abdullah Sani sebagai Ketua Dewan Suro di DPW PKB Jambi. Keuntungan elektoral ini muncul karena posisi tersebut memperkuat dukungan politik dan kesetiaan PKB terhadap pasangan calon, serta memberikan legitimasi dan pengaruh yang diinginkan dalam kontestasi politik. Dari perspektif teori patronase dengan indikator hubungan resiprositas, pernyataan ini menggambarkan secara jelas pola patronase politik, yaitu adanya pertukaran keuntungan antara patron dan klien. Abdullah Sani sebagai patron yang memiliki posisi strategis (Ketua Dewan Suro) menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan politik (klien), dalam hal ini PKB dan para pendukungnya, yang memberikan kesetiaan dan dukungan elektoral sebagai balasan.

Indikator hubungan resiprositas dalam teori patronase menekankan adanya pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan dimana patron menyediakan perlindungan, sumber daya, atau posisi strategis, sementara klien memberikan dukungan politik dan kesetiaan. Dalam pernyataan ini, keuntungan elektoral dan sosiologis yang diperoleh oleh Abdullah Sani dan PKB merupakan wujud nyata dari hubungan tersebut, di mana jabatan dan posisi sosial-politik menjadi modal patron untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan melalui dukungan politik yang terjalin. Jadi, pernyataan tersebut mencerminkan praktik patronase

politik yang khas dengan indikator hubungan resiprositas yakni adanya pertukaran keuntungan yang saling menguntungkan antara patron (Abdullah Sani) dan klien (PKB dan pendukungnya), berupa posisi strategis dan dukungan politik yang saling menguatkan dalam proses pencapaian kekuasaan elektoral.

Di internal DPD Demokrat Provinsi Jambi wawancara bersama Bapak Dr.Ir. Ahmad Fauzi Ansori.M.T selaku ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILLU) partai Demokrat Jambi juga ketua Fraksi Demokrat mengatakan:

“Secara AD/ART tidak mengutip keuntungan disitu, karena secara kewenangan ada di DPP, hari ini kan kita kan masi dalam koalisi partai kemenangan Alharis-Sani, logika berpikinya ketika dalam koalisi maka distribusi Program RPJMB juga bisa didukung oleh partai partai didalam koalisi ini. Dan juga dukungan Demokrat ini tidak didasarkan oleh hubungan kesetiaan dan semua ini putusan partai”⁵⁶

Berdasarkan wawancara bersama pihak Demokrat, secara formal dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tidak disebutkan adanya keuntungan khusus yang diperoleh dari dukungan partai dalam lingkungannya. Hal ini karena kewenangan penuh terkait keputusan politik, termasuk dukungan terhadap calon tertentu, sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian, selama partai masih berada dalam kemenangan, seperti dukungan pendukung Alharis-Sani, maka distribusi logistik program-program pembangunan daerah (RPJMB) dapat berjalan lebih efektif. Partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung dan

⁵⁶ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fauzi Ansori Selaku Ketua Bapillu DPD Demokrat Provinsi Jambi, 19 Mei 2025

mengawal terlaksananya program-program tersebut, sehingga tujuan pembangunan bersama dapat tercapai dengan lebih baik melalui sinergi antar partai.

Dukungan yang diberikan oleh pihak kepada pasangan calon tidak didasarkan pada hubungan kesetiaan pribadi, melainkan merupakan hasil keputusan kolektif pihak. Semua bentuk dukungan yang diberikan telah melalui mekanisme dan pertimbangan organisasi, sehingga keputusan yang diambil bersifat institusional dan bukan berdasarkan kepentingan individu. Hal ini menegaskan bahwa keputusan partai selalu mengedepankan prinsip kolektif dan kepentingan bersama.

Meskipun secara AD/ART keuntungan tidak disebutkan dan kewenangan ada di DPP, dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Haris-Sani dalam koalisi Pilkada Jambi 2024 mencerminkan hubungan patronase yang kuat dengan indikator resiprositas. Dalam koalisi ini, partai Demokrat sebagai patron menyediakan dukungan politik dan distribusi program RPJMB, sementara pasangan calon dan partai koalisi sebagai klien diharapkan memberikan dukungan politik balik yang memperkuat posisi patron yakni paslon Haris-Sani. Keputusan dukungan yang diambil oleh partai pusat menunjukkan adanya pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan, bukan sekadar kesetiaan ideologis, melainkan bentuk timbal balik yang menjadi ciri khas hubungan patron-klien dalam politik lokal. Dengan demikian, meskipun secara formal keputusan diambil oleh partai, secara substansial hubungan ini didasarkan pada mekanisme resiprositas dalam politik patronase.

Di internal DPW PPP Wawancara bersama bapak Ahmad Said Selaku

Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi mengatakan:

“Secara politik pasti ada, tapi untuk 2029 akan berjuang sendiri. Elektabilitas menjadi dasar dukungan dan bisa dibilang menjadi hubungan kesetiaan politik dan kemudian menjadi kepentingan politik sendiri. Selain itu, surat rekomendasi yang diberikan PPP kepada Haris-Sani juga menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk kepercayaan partai terhadap pasangan tersebut untuk menyelesaikan berbagai program prioritas pembangunan di Provinsi Jambi. PPP berharap, dengan dukungan ini, sinergi antara partai dan pasangan calon dapat terwujud demi kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar demi keuntungan politik atau balas jasa pribadi.”⁵⁷

Dari wawancara tersebut secara politik, tentu terdapat unsur kepentingan dan hubungan kesetiaan yang mempengaruhi dukungan partai terhadap pasangan calon. Elektabilitas menjadi faktor utama yang mendasari keputusan tersebut, karena pihak melihat potensi kemenangan sebagai landasan untuk memberikan dukungan. Namun, untuk Pilkada 2029, partai tersebut berencana berjuang secara mandiri tanpa bergantung pada koalisi, menunjukkan strategi politik yang lebih independen ke depan. Surat rekomendasi yang diberikan kepada pasangan Haris-Sani bukan hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan wujud kepercayaan pihak terhadap kemampuan pasangan tersebut dalam menjalankan program-program prioritas pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini menegaskan bahwa dukungan partai didasarkan pada pertimbangan program dan visi pembangunan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, bukan hanya karena faktor politik semata.

⁵⁷ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi, 2 Mei 2025

Partai PPP berharap dukungan yang diberikan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara partai dan pasangan yang kuat demi calon kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dukungan ini diarahkan untuk mengutamakan kepentingan publik dan keinginan pembangunan, bukan sekadar untuk keuntungan politik jangka pendek atau jasa swasta. Oleh karena itu, PPP menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam proses politik yang bertanggung jawab dan fokus pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut mengakui bahwa secara politik memang ada hubungan timbal balik (resiprositas), terutama dalam konteks elektabilitas yang menjadi dasar dukungan dan hubungan kesetiaan politik yang kemudian berkembang menjadi kepentingan politik pribadi. Pernyataan ini mencerminkan adanya indikator hubungan resiprositas dalam teori Patronase, yaitu adanya pertukaran dukungan politik berdasarkan elektabilitas dan kesetiaan. Namun, terdapat juga penegasan bahwa hubungan tersebut tidak hanya bersifat transaksional demi keuntungan pribadi, melainkan diarahkan pada kepentingan kolektif dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pola Patronase yang terjadi di sini adalah bentuk yang lebih terinstitusionalisasi dan berorientasi pada tujuan bersama, meskipun unsur resiprositas sebagai indikator patronase tetap ada.

Di internal DPW PKS Jambi Wawancara Bersama Bapak Afrial selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi mengatakan:

“Sebenarnya partai tu sudah menang pasti dapat keuntungan, bisa dibilang menjadi hubungan saling menguntungkan karna partai politik pasti

mempunyai program program masing-masing, maka dengan dia menang jadinya platformnya sama dengan mereka”⁵⁸

Dari wawancara diatas ketika sebuah partai politik berhasil memenangkan pemilu, kemenangan tersebut secara otomatis membawa sejumlah keuntungan strategi bagi partai tersebut. Kemenangan ini bukan sekedar memperoleh kursi di parlemen atau jabatan eksekutif, melainkan juga membuka peluang untuk mengimplementasikan program-program yang telah dirancang selama masa kampanye. Dengan demikian, pihak pemenang memiliki otoritas dan legitimasi untuk menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam peraturan politik nasional.

Lebih jauh lagi, kemenangan partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara partai dengan berbagai pihak yang mendukungnya. Para pendukung, baik dari kalangan individu, kelompok masyarakat, maupun mitra kemitraan, biasanya berharap program-program partai yang selaras dengan kepentingan mereka dapat terwujud. Di sisi lain, partai politik juga membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keinginan kekuasaan. Hubungan timbal balik ini membentuk ekosistem politik yang dinamis, di mana setiap pihak berusaha memperoleh manfaat dari kemenangan tersebut.

Pada akhirnya, ketika partai politik yang menang memiliki tahapan yang sejalan dengan para pendukungnya, sinergi yang tercipta akan semakin kokoh. Kesamaan visi dan misi memudahkan proses koordinasi, implementasi kebijakan, dan pencapaian tujuan bersama. Hal ini juga memperbesar peluang keberhasilan

⁵⁸ Wawancara Bersama Bapak Afrial Selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi, 21 Februari 2025

program-program yang telah dicanangkan, karena dukungan politik dan sosial yang kuat sudah terbentuk sejak awal. Dengan demikian, kemenangan partai politik tidak hanya menguntungkan secara internal, tetapi juga memperkuat jaringan eksternal yang mendukung tercapainya agenda-agenda strategis.

Pernyataan tersebut mencerminkan indikator hubungan resiprositas dalam teori Patronase, di mana kemenangan partai politik dianggap sebagai sumber keuntungan bersama yang saling menguntungkan antara partai dan paslon. Dalam kerangka patronase, hubungan ini ditandai oleh pertukaran manfaat timbal balik—partai memberikan dukungan politik yang memungkinkan paslon menang, sementara paslon yang menang akan menjalankan program dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan partai, sehingga platform politik keduanya menjadi selaras. Pola ini menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan (resiprositas) yang merupakan ciri khas patronase, di mana partai Demokrat merupakan patron dan Paslon Haris-Sani klien saling bertukar dukungan dan manfaat untuk mencapai tujuan politik masing-masing. Dengan demikian, pernyataan ini mengilustrasikan bagaimana patronase beroperasi melalui mekanisme pertukaran keuntungan yang memperkuat ikatan politik dan memastikan keberlanjutan dukungan dalam sistem politik.

Di internal Gerindra wawancara bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris mengatakan

“Dukungan kami kepada Haris-Sani bukan hanya soal elektabilitas atau survei, tapi juga karena kami ingin kemiskinan pembangunan di Jambi. Dengan kemenangan mereka, program-program yang sejalan dengan visi Gerindra bisa dijalankan, sehingga ada sinergi antara pusat dan daerah, khususnya karena Gerindra juga menjadi partai pemenang. Hubungan kami sangat erat dan saling menguntungkan. Haris-Sani sebagai petahana sangat

terbuka terhadap partai politik, tidak mengotak-kotakkan, sehingga Gerindra merasa dihargai dan punya ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kemenangan Haris-Sani akan memperkuat jaringan politik Gerindra di Jambi.”⁵⁹

Dari wawancara diatas Dukungan Partai Gerindra kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al Haris dan Abdullah Sani, didasarkan pada pertimbangan yang lebih dari sekedar elektabilitas atau hasil survei. Gerindra menilai pasangan ini terbukti mampu membangun Jambi, terutama dalam menghadapi tantangan pasca pandemi. Dengan kemenangan Haris-Sani, program-program yang sejalan dengan visi dan misi Gerindra dapat dijalankan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat Gerindra juga menjadi partai pemenang di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Gerindra untuk tidak adanya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

Hubungan Gerindra dan Haris-Sani sangat erat dan saling menguntungkan. Sebagai petahana, Haris-Sani terbuka terhadap partai politik tanpa membatasi ruang gerak mereka, sehingga Gerindra merasa dihargai dan memiliki kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kemenangan pasangan ini juga akan memperkuat jaringan politik Gerindra di Jambi, memungkinkan partai untuk memastikan implementasi kebijakan pusat yang diusung oleh Prabowo Subianto berjalan efektif di tingkat daerah. Selain itu, keberhasilan mendukung pasangan calon yang menang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

⁵⁹ Wawancara Bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris DPW Gerindra Jambi, 21 Februari 2025

Gerindra, memperkokoh posisi partai dalam pemilu berikutnya, dan menjaga soliditas kader di semua tingkatan.

Dari sudut pandang teori patronase dengan indikator hubungan resiprositas, pernyataan ini menunjukkan adanya pola hubungan patron-klien yang khas, di mana patron (Haris-Sani sebagai petahana dan pihak yang memiliki kekuasaan) menyediakan ruang dan kesempatan bagi klien (Gerindra) untuk berkontribusi dalam pembangunan dan politik daerah. Sebagai balasannya, Gerindra memberikan dukungan politik yang memperkuat posisi Haris-Sani dan sekaligus memperluas jaringan politik partai tersebut di wilayah Jambi. Dalam konteks ini, keterbukaan Haris-Sani terhadap partai politik dan pemberian ruang kontribusi merupakan bentuk sumber daya yang diberikan patron, sedangkan dukungan politik Gerindra sebagai klien merupakan imbalan yang memperkuat kekuasaan patron dan memperluas pengaruh partai.

Selain itu, sinergi antara pusat dan daerah yang disebutkan juga mengindikasikan penggunaan jaringan patronase yang lebih luas, di mana partai pemenang di tingkat pusat dapat memanfaatkan hubungan patron-klien untuk mendukung pembangunan dan konsolidasi kekuasaan di daerah. pernyataan ini mencerminkan praktik politik patronase dengan indikator hubungan resiprositas yang kuat, berupa pertukaran dukungan politik dan akses kontribusi pembangunan antara patron (Haris-Sani) dan klien (Gerindra), yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi politik kedua belah pihak di Provinsi Jambi.

Di internal DPW Golkar Jambi Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli mengatakan:

“Tentu saja ada. Dukungan Golkar kepada Haris-Sani bukan hanya soal strategi politik atau elektabilitas semata, tapi juga karena kami melihat pasangan ini mampu melanjutkan pembangunan Jambi, terutama pasca pandemi. Hubungan kami sangat erat dan saling menguntungkan. Golkar memberikan dukungan penuh, dan seluruh kader partai wajib memenangkan Haris-Sani. Sebagai imbalannya, kemenangan Haris-Sani akan memperkuat jaringan politik Golkar di Jambi dan memastikan kebijakan pusat yang diusung oleh Golkar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.”⁶⁰

Dari wawancara diatas dukungan Partai Golkar kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Haris-Sani, didasarkan pada keyakinan bahwa pasangan ini mampu melanjutkan pembangunan di Jambi, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi. Golkar melihat bahwa keinginan program pembangunan yang telah berjalan selama masa jabatan sebelumnya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Golkar, seluruh partai kader di Jambi diwajibkan untuk memenangkan pasangan ini, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara visi partai dan program pembangunan daerah.

Hubungan Golkar dan Haris-Sani bersifat erat dan saling menguntungkan. Golkar memberikan dukungan penuh sebagai bentuk komitmen politik, sementara kemenangan Haris-Sani akan memperkuat jaringan politik Golkar di tingkat daerah. Hal ini memungkinkan Golkar untuk memastikan bahwa kebijakan pusat yang diusung partai dapat diimplementasikan secara efektif di Jambi. Kemenangan ini

⁶⁰ Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli DPW Golkar Jambi, 7 Mei 2025

juga akan meningkatkan posisi strategis Golkar dalam peta politik daerah dan nasional, serta memperkokoh soliditas kader partai.

Pernyataan dukungan Golkar kepada pasangan Haris-Sani menunjukkan adanya hubungan patronase dengan indikator hubungan resiprositas yang kuat. Golkar memberikan dukungan penuh bukan hanya karena strategi politik atau elektabilitas, tetapi juga karena pasangan ini dianggap mampu melanjutkan pembangunan Jambi, terutama pasca pandemi. Hubungan yang digambarkan sangat erat dan saling menguntungkan, di mana Golkar memberikan dukungan penuh dan menginstruksikan seluruh kader untuk memenangkan pasangan tersebut. Dalam kerangka teori patronase, Golkar sebagai patron menyediakan sumber daya politik berupa dukungan resmi, rekomendasi, dan mobilisasi kader partai untuk memenangkan Haris-Sani. Sebagai imbalannya, kemenangan pasangan ini akan memperkuat jaringan politik Golkar di Jambi dan memastikan kebijakan pusat yang diusung Golkar dapat diimplementasikan di daerah.

Ini merupakan pertukaran timbal balik khas hubungan patron-klien, di mana patron memberikan akses dan dukungan, sementara klien memberikan legitimasi politik dan kesempatan bagi patron untuk memperluas pengaruhnya. Dukungan Golkar yang bersifat formal dan terorganisir, termasuk instruksi kepada kader untuk memenangkan pasangan, mengindikasikan hubungan yang terstruktur dan institusional, bukan sekadar hubungan informal atau personal. Sinergi antara pusat dan daerah yang disebutkan juga memperkuat jaringan patronase yang lebih luas, memanfaatkan posisi Golkar sebagai partai pemenang nasional untuk memperkuat posisi politik di tingkat lokal. Kesimpulannya, pernyataan ini mencerminkan

praktik patronase politik dengan indikator hubungan resiprositas: adanya pertukaran keuntungan antara Golkar sebagai patron yang menyediakan dukungan politik dan sumber daya, dan Haris-Sani sebagai klien yang memberikan legitimasi dan kesempatan bagi Golkar untuk memperkuat jaringan politik dan mengimplementasikan kebijakan partai di daerah.

3.1.3. Hubungan Loyalitas

Hubungan loyalitas dalam pola patron-klien merupakan aspek penting yang menandai interaksi antara patron dan klien. Loyalitas ini berupa kesetiaan dan kepatuhan klien kepada patron sebagai bentuk balasan atas bantuan, perlindungan, atau sumber daya yang diberikan patron. Kesetiaan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mengandung unsur moral dan emosional, yang membuat klien merasa ikatan pribadi kepada patron. Loyalitas klien biasanya muncul karena adanya rasa hutang budi atau ketergantungan terhadap patron. Misalnya, dalam komunitas nelayan, klien menunjukkan loyalitas dengan tidak berpindah-pindah patron meskipun ada tawaran yang lebih menguntungkan, karena merasa berhutang budi atas bantuan yang diberikan patron saat menghadapi kesulitan seperti musibah atau kegagalan panen. Ketergantungan ini memperkuat kelanggengan hubungan patron-klien dalam jangka panjang.

Selain itu, loyalitas dalam hubungan patron-klien bersifat timbal balik (resiprositas), di mana patron memberikan perlindungan ber daya, sementara klien membalasnya dengan dukungan dan jasa pribadi. Hubungan ini bersifat individual dan intens, bukan sekadar transaksi ekonomi, sehingga melibatkan perasaan dan

kepercayaan antar individu. Hal ini membuat loyalitas menjadi fondasi yang menjaga stabilitas dan kegelisahan hubungan patron-klien. Namun, loyalitas yang kuat juga dapat menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, sehingga klien sulit lepas dari patron hubungan meskipun kondisi tersebut tidak selalu menguntungkan bagi mereka. Loyalitas ini terkadang menjadi strategi perlindungan bagi klien untuk menjaga kelangsungan hidup dalam situasi sosial-ekonomi yang tidak seimbang. Di sisi lain, patron juga bergantung pada klien dalam mempertahankan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya.

Di internal PDIP Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum DPW PDIP Jambi yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jambi Mengatakan :

“Bukan karena hubungan loyalitas atau apapun, karena beda politik dan juga saya sebagai ketua DPRD pda saat itu, saya tau betul gubernur ini membangun masyarakat jambi pada saat itu. Contoh waktunya ga ada kosong dari pagi sampai pagi kerja untuk masyarkat, itu yang menjadikan evaluasi kami, kebetulan juga kader internal tidak ada yang maju ke pemilihan gubernur kita bersama anggota partai memutuskan untuk mendukung pak Haris-Sani yang tidak didasari hubungan loyalitas”⁶¹

Dari wawancara diatas keputusan dukungan politik yang diambil oleh Ketua DPRD dan anggota partai bukanlah hasil dari hubungan loyalitas atau ikatan individual, melainkan didasarkan pada pertimbangan politik yang berbeda. Sebagai Ketua DPRD pada saat itu, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kinerja gubernur yang sedang menjabat, yang dikenal bekerja tanpa henti dari pagi hingga

⁶¹ Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum PDIP Provinsi Jambi, 3 Mei 2025

pagi demi membangun masyarakat Jambi. Kinerja nyata ini menjadi dasar evaluasi penting dalam pengambilan keputusan politik mereka.

Selain itu, situasi politik saat pemilihan gubernur tidak memungkinkan adanya kader inside partai yang maju sebagai calon. Kondisi ini memaksa partai untuk mengambil keputusan strategi demi kepentingan bersama dan keinginan pembangunan daerah. Oleh karena itu, partai bersama-sama memutuskan untuk mendukung pasangan Haris-Sani, yang dinilai mampu melanjutkan pembangunan dan memenuhi aspirasi masyarakat, tanpa adanya loyalitas dasar politik. Kesimpulannya, keputusan dukungan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan partai politik lebih mengutamakan kinerja dan kepentingan rakyat daripada hubungan patron-klien atau loyalitas pribadi. Pendekatan ini mencerminkan sikap pragmatis dan tujuan dalam politik, dalam mana keberhasilan pembangunan dan pelayanan menjadi prioritas masyarakat utama dalam menentukan pilihan politik.

Meskipun pernyataan menyatakan bahwa dukungan bukan didasarkan pada hubungan loyalitas, analisis menunjukkan bahwa dukungan tersebut sesungguhnya mencerminkan hubungan patronase dengan indikator loyalitas politik. Pernyataan informan yang dimana pernah menjabat Sebagai ketua DPRD dan bagian dari struktur partai, keputusan mendukung Haris-Sani didasarkan pada evaluasi kinerja dan kepercayaan terhadap kemampuan gubernur dalam membangun masyarakat Jambi. Hal ini menunjukkan adanya loyalitas struktural dari kader dan elit partai kepada figur yang dianggap mampu memenuhi kepentingan politik dan pembangunan. Loyalitas ini menjadi mekanisme penting dalam hubungan patron-klien, di mana partai PDIP sebagai patron memberikan dukungan kepada klien

Haris-Sani sebagai imbalan atas kinerja dan komitmen politik yang menguntungkan partai. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit menolak loyalitas sebagai dasar dukungan, secara substansial hubungan ini tetap dibangun atas fondasi loyalitas yang menjadi ciri khas patronase politik.

Di internal DPW PKB wawancara bersama bapak Eko selaku wakil sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi mengatakan:

“Pertama ini sifatnya mitra, dan kebetulan disitu ada pak Abdullah Sani yang merupakan kader dari PKB sendiri ini juga sebagai bentuk kesetiaan terhadap kader kita. Tidak ada tekanan dari pihak luar, tapi lebih ke timbal balik politik saja”⁶²

Dari wawancara itu terungkap bahwa hubungan yang terjalin bersifat mitra, yang menunjukkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, dukungan yang diberikan kepada Pak Abdullah Sani sebagai kader dari PKB, yang juga mencerminkan bentuk kesetiaan partai terhadap kader internalnya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas partai kepada kader menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya, keputusan atau dukungan yang diberikan tidak berasal dari tekanan eksternal atau pihak luar, melainkan berdasarkan kesepakatan dan hubungan timbal balik secara politik. Artinya, hubungan ini lebih bersifat strategis dan pragmatis, di mana kedua belah pihak saling memberikan dukungan untuk mencapai tujuan politik bersama tanpa adanya paksaan dari luar. Dengan demikian, hubungan politik yang dibangun dalam konteks ini mengedepankan prinsip kemitraan dan kesetiaan inside partai, serta didasarkan pada pertukaran dukungan

⁶² Wawancara Bersama Bapak Eko Selaku Wakil Sekeretaris DPW PKB Provinsi Jambi,1 Mei 2025

yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memperkuat solidaritas partai dan memastikan keinginan dukungan terhadap kader yang dianggap mampu membawa kepentingan partai dan masyarakat.

Pernyataan ini menyebutkan bahwa hubungan yang terjalin bersifat mitra, dengan adanya Abdullah Sani sebagai kader PKB yang menjadi simbol kesetiaan terhadap kader partai sendiri. Pernyataan juga menegaskan bahwa tidak ada tekanan dari pihak luar, melainkan hubungan tersebut merupakan timbal balik politik. Pernyataan menegaskan adanya kesetiaan internal terhadap kader partai, yakni Abdullah Sani sebagai kader PKB. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan loyalitas yang kuat di dalam partai, yang menjadi salah satu indikator patronase. Kesetiaan ini bukan hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif sebagai bentuk solidaritas dan dukungan antar anggota partai.

Pernyataan ini secara jelas mencerminkan indikator hubungan loyalitas dalam teori Patronase, di mana kesetiaan terhadap kader partai menjadi pondasi utama hubungan politik. Selain itu, adanya timbal balik politik menunjukkan adanya resiprositas yang khas dalam patronase, yakni pertukaran keuntungan yang saling menguntungkan antara patron dan klien. Hubungan yang bersifat mitra dan tanpa tekanan eksternal menegaskan bahwa hubungan patronase ini berjalan secara sukarela dan berlandaskan kesetiaan internal partai.

Di internal DPD Demokrat Provinsi Jambi wawancara bersama Bapak Dr.Ir. Ahmad Fauzi Ansori.M.T selaku ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILLU) partai Demokrat Jambi juga ketua Fraksi Demokrat mengatakan:

“Nah pada periode pertama kami tidak mendukung pak Haris karena pak Fachori Umar yang kami dukung, nah pertanyaanya kenapa mendukung

bukan karena hubungan loyalitas tetapi ini semua keputusan partai Demokrat sendiri dan disetujui semua kader”⁶³

Dari wawancara diatas adalah bahwa pada periode pertama, partai Demokrat tidak mendukung Pak Haris karena mereka memilih untuk mendukung Pak Fachori Umar sebagai calon gubernur. Keputusan ini menunjukkan bahwa pilihan politik partai didasarkan pada pertimbangan strategis dan kebijakan internal, bukan karena adanya hubungan loyalitas pribadi dengan calon tertentu. Selanjutnya, keputusan mendukung Pak Fachori Umar merupakan hasil kesepakatan kolektif yang diambil oleh partai Demokrat secara inside dan disetujui oleh seluruh kader.

Hal ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam partai berjalan secara demokratis dan melibatkan partisipasi anggota partai, sehingga dukungan yang diberikan mencerminkan konsensus bersama. Dengan demikian, dukungan politik partai Demokrat pada periode tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan partai dan strategi politik daripada hubungan loyalitas atau patronase. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan politik partai bersifat rasional dan kolektif, yang mengutamakan kepentingan organisasi dan efektivitas dalam memenangkan pemilihan.

Meskipun pernyataan menegaskan bahwa dukungan Partai Demokrat pada periode kedua bukan didasarkan pada hubungan loyalitas, analisis menunjukkan bahwa keputusan tersebut tetap mencerminkan pola hubungan patronase dengan

⁶³ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fauzi Ansori Selaku Ketua Bapillu DPD Demokrat Provinsi Jambi, 19 Mei 2025

indikator loyalitas politik. Keputusan partai untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang disetujui oleh seluruh kader, menunjukkan adanya mekanisme internal yang mengikat kader untuk tunduk dan loyal kepada keputusan elite partai sebagai patron. Loyalitas ini menjadi fondasi penting dalam hubungan patron-klien, di mana kader dan calon sebagai klien menerima arahan dan dukungan dari patron partai demi menjaga kesatuan dan kekuatan politik. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit menolak dasar loyalitas, secara praktis dukungan ini tetap dibangun atas loyalitas struktural yang menjadi ciri khas hubungan patronase dalam politik partai.

Di internal DPW PPP Wawancara bersama bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi mengatakan:

“Pada periode satu kemarin kita juga mendukung pak Haris-Sani ini juga menunjukkan bahwa elektabilitas beliau di periode pertama bagus, akhirnya PPP memutuskan mendukung pak Haris lagi, bukan berarti kesetiaan juga ini bisa disebut hubungan kepentingan politik juga”⁶⁴

Dari wawancara diatas Keputusan PPP untuk kembali mendukung pasangan Haris-Sani pada periode kedua didasarkan pada elektabilitas pasangan tersebut yang dinilai sangat baik selama periode pertama. Kinerja dan program yang telah dijalankan oleh Haris-Sani mendapat apresiasi luas dari masyarakat Jambi, sehingga partai melihat dukungan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan ini bukan semata-mata karena loyalitas, melainkan lebih pada pertimbangan kepentingan politik dan keberhasilan pasangan tersebut dalam memimpin.

⁶⁴ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi, 2 Mei 2025

Elektabilitas Haris-Sani yang terus meningkat dan stabil menjadi faktor utama yang mendorong PPP untuk mempertahankan dukungan. Survei-survei menunjukkan bahwa pasangan ini sangat populer dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat, dari berbagai usia, suku, dan latar belakang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan PPP didasarkan pada realitas politik dan kepercayaan terhadap kemampuan pasangan tersebut dalam melanjutkan program-program yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, dukungan PPP kepada Haris-Sani pada periode kedua lebih mencerminkan hubungan kepentingan politik yang rasional dan pragmatis daripada sekadar kesetiaan atau loyalitas individual. Partai mengambil keputusan berdasarkan evaluasi kinerja dan potensi kemenangan pasangan tersebut, sehingga dukungan ini menjadi bagian dari strategi politik untuk memenangkan pemilihan dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Jambi.

Pernyataan menyebut dukungan PPP kepada Haris-Sani didasarkan pada elektabilitas dan kepentingan politik, analisis menunjukkan bahwa hubungan tersebut mengandung indikator kuat patronase dengan basis loyalitas politik. Dukungan berkelanjutan dari PPP setelah periode pertama mencerminkan adanya loyalitas struktural yang terbangun antara partai sebagai patron dan Haris-Sani sebagai klien. Loyalitas ini bukan sekadar kesetiaan personal, melainkan bentuk pertukaran kepentingan politik di mana partai memberikan dukungan untuk mempertahankan pengaruhnya, sementara calon menyediakan legitimasi dan keberlanjutan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit disebut bukan karena kesetiaan, hubungan ini secara substansial didasarkan pada loyalitas

politik yang menjadi ciri khas hubungan patron-klien dalam dinamika politik Pilkada.

Di internal DPW PKS Jambi Wawancara Bersama Bapak Afrial selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi mengatakan:

“Kami mendukung Haris-Sani juga didasari hubungan loyalitas dimana visi misi yang sama membawa PKS kembali membentangkan dukungannya pada periode kedua ini, bisa dibilang ada hubungan kesetiaan juga tapi tidak terlepas dari hubungan politik dan PKS menunjukkan loyalitas kepada pasangan dengan cara tetap mendukung pada periode kedua ini”⁶⁵

Dari wawancara di atas dukungan PKS kepada pasangan Haris-Sani pada periode kedua didasarkan pada kesamaan visi dan misi yang diyakini mampu membawa kemajuan bagi Provinsi Jambi. Dalam konteks ini, PKS menunjukkan loyalitas kepada pasangan calon tersebut dengan tetap memberikan dukungan, yang mencerminkan adanya hubungan kesetiaan antar kader dan partai. Namun, loyalitas ini tidak terlepas dari pertimbangan politik yang matang, di mana dukungan diberikan sebagai bagian dari strategi politik bersama.

Selain aspek kesetiaan, PKS juga menempatkan hubungan politik sebagai faktor penting dalam keputusan mendukung Haris-Sani kembali. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana PKS berharap pasangan calon dapat menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik sepanjang masa kepemimpinan, bukan hanya saat menjelang pemilihan. Loyalitas PKS diwujudkan melalui komitmen

⁶⁵ Wawancara Bersama Bapak Afrial Selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi, 21 Februari 2025

berkelanjutan dalam koalisi dan dukungan aktif dari kader militannya untuk memenangkan pasangan tersebut.

Dengan demikian, dukungan PKS kepada Haris-Sani pada periode kedua merupakan perpaduan antara loyalitas internal dan kepentingan politik yang strategis. PKS menilai bahwa pasangan ini tidak hanya sejalan secara ideologis tetapi juga mampu memenuhi harapan partai dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Jambi. Keputusan ini menunjukkan bahwa loyalitas dalam politik partai selalu beriringan dengan pertimbangan pragmatis dan evaluasi kinerja.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya hubungan loyalitas dalam konteks teori Patronase, di mana dukungan PKS kepada pasangan Haris-Sani pada periode kedua didasarkan pada kesamaan visi dan misi yang diusung. Loyalitas partai terhadap pasangan calon ini menunjukkan ikatan kesetiaan yang melekat, yang merupakan salah satu indikator utama dalam hubungan Patronase. Namun, pernyataan juga menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada loyalitas personal, melainkan juga terkait dengan kepentingan politik bersama. Hal ini sesuai dengan konsep Patronase yang menekankan adanya pertukaran timbal balik antara patron dan klien, di mana dukungan politik diberikan sebagai balasan atas kesamaan tujuan dan janji untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian, pola hubungan yang terjadi adalah kombinasi antara loyalitas dan kepentingan politik, yang mencerminkan dinamika patronase modern yang tidak hanya mengandalkan kesetiaan personal, tetapi juga orientasi strategis dalam mencapai tujuan politik dan pembangunan.

Di internal Gerindra wawancara bersama Bapak Arman Siregar Selaku

Wakil Sekretaris mengatakan:

“Dukungan Gerindra terhadap pasangan Haris-Sani pada periode kedua ini bukan semata-mata karena bentuk kesetiaan atau loyalitas pribadi. Namun, lebih kepada pertimbangan politik yang matang dan kesepakatan strategis antara partai dan pasangan calon. Kami melihat bahwa Haris-Sani memiliki kinerja yang baik dan elektabilitas yang kuat, sehingga mendukung mereka adalah langkah yang tepat untuk memastikan kelanjutan pembangunan di Jambi. Jadi, dukungan ini lebih didasarkan pada kepentingan bersama dan visi yang sejalan, bukan hanya soal loyalitas semata”⁶⁶

Dari wawancara diatas diketahui dukungan Gerindra terhadap pasangan Haris-Sani pada periode kedua bukan didasarkan pada kesetiaan atau loyalitas pribadi semata, melainkan atas pertimbangan politik yang matang dan kesepakatan strategis antara partai dengan pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik Gerindra lebih bersifat rasional dan pragmatis, dengan fokus pada efektivitas dan keberlanjutan kepemimpinan yang sudah berjalan. Gerindra menilai bahwa kinerja Haris-Sani selama periode pertama cukup baik dan elektabilitas mereka kuat di mata masyarakat. Oleh karena itu, dukungan diberikan sebagai langkah strategis untuk memastikan kelanjutan pembangunan di Jambi, yang dianggap penting bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan ini juga mencerminkan kesamaan visi dan tujuan antara Gerindra dan pasangan calon tersebut. Dengan demikian, dukungan Gerindra lebih didasarkan pada kepentingan bersama dan keselarasan visi politik, bukan sekadar loyalitas individual atau hubungan patron-klien. Pendekatan ini memperkuat posisi Haris-Sani dalam kontestasi politik dan memberikan landasan yang kuat untuk

⁶⁶ Wawancara Bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris DPW Gerindra Jambi, 21 Februari 2025

melanjutkan program-program pembangunan yang telah berjalan, sekaligus mencerminkan dinamika politik yang pragmatis dan terukur.

Meskipun Gerindra menyatakan dukungannya kepada pasangan Haris-Sani bukan semata karena loyalitas pribadi, melainkan berdasarkan pertimbangan politik matang dan kesepakatan strategis, analisis menunjukkan bahwa dukungan ini tetap mencerminkan hubungan patronase dengan indikator loyalitas politik. Gerindra sebagai patron memberikan legitimasi politik dan dukungan sumber daya kepada Haris-Sani sebagai klien yang memiliki elektabilitas dan kinerja baik, sehingga hubungan ini dibangun atas dasar loyalitas struktural yang mengikat kedua pihak dalam pertukaran kepentingan. Loyalitas tersebut bukan hanya kesetiaan personal, melainkan komitmen politik yang memastikan kelanjutan pembangunan dan keberlanjutan kekuasaan, menjadikan hubungan patron-klien ini sebagai fondasi penting dalam dinamika politik Pilkada Jambi 2024.

Di internal DPW Golkar Jambi Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli mengatakan:

“Dukungan Partai Golkar terhadap pasangan Haris-Sani pada periode kedua merupakan bentuk komitmen politik yang kuat, yang didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan pembangunan di Jambi. Golkar menilai bahwa kepemimpinan Haris-Sani selama periode pertama telah membawa kemajuan yang signifikan, sehingga partai memutuskan untuk kembali memberikan dukungan. Sikap ini juga mencerminkan loyalitas partai terhadap keputusan DPP dan keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, dukungan Golkar bukan hanya sekadar loyalitas personal, melainkan juga wujud kepatuhan kader partai terhadap arahan dan kebijakan partai. Contohnya, kader Golkar yang awalnya berencana maju sebagai calon justru memilih mundur demi mendukung pasangan petahana sesuai keputusan partai, menunjukkan tingkat disiplin dan kesetiaan yang

tinggi kepada organisasi. Hal ini memperkuat posisi Haris-Sani sebagai calon yang solid dan didukung penuh oleh partai besar di Jambi”⁶⁷

Dari wawancara diatas Partai Golkar terhadap pasangan Haris-Sani pada periode kedua mencerminkan komitmen politik yang kuat dan strategis, yang didasari oleh pertimbangan keberlanjutan pembangunan di Jambi. Golkar menilai bahwa kepemimpinan Haris-Sani selama periode pertama telah berhasil membawa kemajuan signifikan, sehingga partai memutuskan untuk memberikan dukungan kembali demi memastikan kelanjutan program pembangunan tersebut. Lebih dari sekadar loyalitas personal, dukungan Golkar juga merupakan wujud kepatuhan kader terhadap arahan dan kebijakan partai. Contohnya, kader Golkar yang awalnya berencana maju sebagai calon justru memilih mundur demi mendukung pasangan petahana sesuai keputusan partai.

Sikap ini menunjukkan tingkat disiplin dan kesetiaan yang tinggi kepada organisasi, sekaligus memperkuat posisi Haris-Sani sebagai calon yang solid dan didukung penuh oleh partai besar di Jambi. Dengan demikian, dukungan Golkar tidak hanya didasarkan pada loyalitas, tetapi juga pada keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pusat serta strategi politik yang matang. Keputusan ini memperkuat fondasi politik pasangan Haris-Sani untuk melanjutkan kepemimpinan mereka, sekaligus memastikan stabilitas dan keberhasilan program pembangunan di masa depan.

Pernyataan dukungan Partai Golkar terhadap pasangan Haris-Sani pada periode kedua mencerminkan pola hubungan patronase dengan indikator

⁶⁷ Wawancara Bersama Bapak Achmad Syaqui Selaku Staf Ahli DPW Golkar Jambi, 7 Mei 2025

hubungan loyalitas yang kuat. Dukungan ini didasarkan pada komitmen politik yang kokoh dan pertimbangan keberlanjutan pembangunan di Jambi, yang menunjukkan keselarasan visi antara pemerintah daerah dan pusat serta kepercayaan partai terhadap kinerja Haris-Sani pada periode pertama. Loyalitas partai tidak hanya bersifat personal tetapi juga institusional, terlihat dari kepatuhan kader Golkar terhadap keputusan DPP, termasuk kader yang mundur dari pencalonan demi mendukung pasangan petahana, menandakan disiplin dan kesetiaan tinggi terhadap organisasi. Dalam teori patronase, loyalitas merupakan indikator utama yang mengikat patron dan klien dalam hubungan yang saling menguntungkan, di sini Golkar sebagai patron memberikan dukungan dan legitimasi politik, sementara Haris-Sani sebagai klien memperkuat posisi partai di daerah serta memastikan implementasi kebijakan partai. Sikap kader yang mengutamakan keputusan partai memperkuat jaringan patronase yang terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bagaimana loyalitas partai menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kekuasaan dan memperkuat pengaruh politik di tingkat daerah. Dengan demikian, dukungan Golkar ini adalah contoh nyata hubungan patronase yang berlandaskan loyalitas kolektif dan kepatuhan organisasi, bukan sekadar hubungan personal semata.

3.1.4 Hubungan Personal

Hubungan personal dalam teori patronase secara umum merujuk pada relasi antara dua pihak yang tidak setara, yaitu patron dan klien, yang terjalin berdasarkan pertukaran kepentingan dan kebutuhan. Patron adalah individu atau kelompok yang memiliki sumber daya, kekuasaan, dan pengaruh, sedangkan klien adalah pihak

yang lebih lemah secara sosial atau ekonomi dan membutuhkan bantuan atau perlindungan dari patron. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana patron memberikan dukungan berupa uang, jabatan, proyek, atau perlindungan, sementara klien memberikan dukungan politik, kesetiaan, atau jasa sebagai balasannya.

Secara personal, hubungan patronase bersifat sangat dekat dan emosional, karena klien merasa berhutang budi dan memiliki loyalitas yang kuat kepada patronnya. Dalam praktiknya, klien cenderung membela patronnya tanpa kritik, bahkan dalam kondisi patron melakukan kesalahan, yang mencerminkan adanya ikatan moral dan sosial yang kuat. Hubungan ini juga sering kali bersifat permanen dan langgeng selama kedua belah pihak merasakan manfaat dari relasi tersebut. Namun, nilai-nilai dalam hubungan patron-klien ini seringkali bertentangan dengan prinsip demokrasi dan birokrasi modern yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks politik, hubungan personal patronase menjadi mekanisme penting untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Patron menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membangun jaringan dukungan melalui klien, yang bisa berupa pemilih, birokrat, atau kelompok masyarakat tertentu. Hubungan ini memungkinkan patron untuk mengamankan suara dalam pemilu atau dukungan politik lainnya, sementara klien mendapatkan keuntungan materi atau perlindungan sosial. Dengan demikian, patronase adalah bentuk relasi sosial-politik yang menggabungkan aspek personal, ekonomi, dan kekuasaan dalam satu jaringan pertukaran yang saling menguntungkan.

Di internal PDIP Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum DPW PDIP Jambi yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jambi Mengatakan :

“Tidak ada hubungan personal apapun dengan paslon, PDIP hanya menjalin hubungan kerja politik tapi tidak dipungkiri ada beberapa kali silaturahmi sebelum pencalonan, karena survey beliau juga bagus maka PDIP mencoba menjalin komunikasi juga bersama beliau, dan ini hanya sebatas hubungan kerjasama politik”⁶⁸

Dari wawancara diatas PDIP menegaskan bahwa kedekatan mereka dengan kandidat tidak lebih dari hubungan kerja politik yang strategis. Meskipun ada interaksi dan silaturahmi sebelum pencalonan, hal ini didasari oleh hasil survei yang menjanjikan. Dengan demikian, PDIP melihat potensi kerjasama yang menguntungkan dalam mencapai tujuan politik bersama. Keputusan PDIP untuk menjalin komunikasi dengan kandidat didorong oleh pertimbangan pragmatis, bukan karena hubungan individual. Survei yang positif menjadi landasan utama bagi partai untuk membuka ruang dialog dan penjajakan potensi kerjasama. Ini adalah langkah yang rasional dalam konteks strategi politik yang lebih luas.

Dengan demikian, PDIP ingin menekankan bahwa kerjasama ini murni didasarkan pada kepentingan politik bersama. Tidak ada ikatan emosional atau hubungan pribadi yang mendasari dukungan mereka terhadap kandidat. Semua tindakan dan keputusan diambil berdasarkan analisis rasional dan perhitungan strategis untuk mencapai tujuan politik partai.

⁶⁸ Wawancara Bersama Bapak Edi Purwanto Selaku Ketua Umum PDIP Provinsi Jambi, 3 Mei 2025

Meskipun PDIP menyatakan bahwa hubungan dengan pasangan calon hanya sebatas kerja politik dan bukan hubungan personal, analisis menunjukkan adanya indikasi kuat hubungan patronase dengan indikator hubungan personal yang melekat. Silaturahmi dan komunikasi yang terjalin sebelum pencalonan mencerminkan adanya ikatan personal yang berfungsi memperkuat jaringan patron-klien di balik kerja sama politik formal. Hubungan personal ini menjadi modal sosial penting yang memperkuat loyalitas dan komitmen antara partai sebagai patron dan calon sebagai klien, sehingga memfasilitasi pertukaran sumber daya politik dan dukungan elektoral. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit disebut sebagai hubungan kerja, secara substansial hubungan ini mengandung unsur patronase yang ditandai oleh kedekatan personal sebagai fondasi penguatan kemitraan politik.

Di internal DPW PKB wawancara bersama bapak Eko selaku wakil sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi mengatakan:

“Kalau dalam politik sudah biasa ada kedekatan tokoh-tokoh tersebut, hubungan sudah terjalin sejak lama dan juga pada periode satu saat mencalonkan pak Sani juga sudah menjadi bagian dari PKB dan di periode kedua ini tinggal melanjutkan.”⁶⁹

Dari wawancara diatas kedekatan antar tokoh merupakan hal yang lumrah dan sering kali menjadi fondasi penting dalam membangun kerja sama strategis. Hubungan yang telah terjalin sejak lama mencerminkan adanya kepercayaan dan pemahaman yang mendalam antara para tokoh tersebut. Kedekatan ini tidak hanya terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan

⁶⁹ Wawancara Bersama Bapak Eko Selaku Wakil Sekeretaris DPW PKB Provinsi Jambi, 1 Mei 2025

komunikasi intensif, kolaborasi dalam berbagai kesempatan, serta pengalaman bersama dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah.

Pada periode pertama pencalonan Pak Sani, keterlibatan beliau sebagai bagian dari PKB menjadi bukti nyata dari hubungan yang telah terbangun dengan baik. Kini, memasuki periode kedua, hubungan yang sudah terjalin erat tersebut tinggal dilanjutkan dan diperkuat. Tidak ada lagi proses adaptasi yang rumit, karena pola kerja sama dan komunikasi sudah terbentuk dengan baik sejak awal. Fokus utama saat ini adalah melanjutkan program-program yang telah dirintis, memperkuat sinergi, serta menjaga komitmen bersama demi mewujudkan tujuan politik yang telah disepakati. Dengan fondasi yang kuat, diharapkan perjalanan politik ke depan akan semakin strong dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya indikator hubungan individual dalam teori patronase, di mana kedekatan antara tokoh-tokoh politik sudah terjalin sejak lama dan menjadi dasar hubungan yang berkelanjutan. Hubungan yang sudah terbangun sejak periode pertama, ketika Pak Sani sudah menjadi bagian dari PKB, menunjukkan adanya ikatan emosional dan kesetiaan personal yang kuat antara patron dan klien. Melanjutkan dukungan pada periode kedua mencerminkan kesinambungan hubungan patronase yang berlandaskan loyalitas personal dan jaringan sosial yang erat, yang memperkuat stabilitas dan keberlanjutan kekuasaan politik. Dengan demikian, pernyataan ini menggambarkan pola patronase klasik di mana hubungan personal menjadi indikator kunci dalam membangun dan mempertahankan koalisi politik.

Di internal DPD Demokrat Provinsi Jambi wawancara bersama Bapak Dr.Ir. Ahmad Fauzi Ansori.M.T selaku ketuaJad Badan Pemenangan Pemilu (BAPILLU) partai Demokrat Jambi juga ketua Fraksi Demokrat mengatakan:

“Jadi yang jelas pasti ada kedekatan personal antara Alharis dengan partai Demokrat, karena beliau bermain di undang undang 2023 pemerintahan daerah antara Gubernur dan DPR, kalau hubungan kekerabatan ya saya kira itu normatiflah, pak haris juga sebelum pilkada beliau melakukan roadshow kesemua partai, nah terjalinlah pertemuan terbuka dengan beliau”⁷⁰

Wawancara tersebut menegaskan adanya kedekatan individual antara Alharis dengan Partai Demokrat. Kedekatan ini tidak hanya bersifat kasual, tetapi juga didukung oleh dinamika politik yang terjadi dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2023, khususnya dalam hubungan antara Gubernur dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang terjalin bukan semata-mata karena faktor kekerabatan, tetapi juga karena adanya interaksi dan komunikasi politik yang intens di antara kedua pihak. Lebih lanjut, hubungan kekerabatan yang disebutkan dalam pernyataan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang normatif atau wajar dalam dunia politik. Artinya, relasi individual atau kekeluargaan memang sering terjadi dan menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia. Namun, faktor utama yang memperkuat hubungan antara Alharis dan Partai Demokrat adalah aktivitas politik yang dilakukan secara terbuka, terutama menjelang Pilkada, di mana Alharis melakukan roadshow ke semua partai politik.

Melalui roadshow tersebut, Alharis membangun komunikasi dan memperluas jaringan politiknya. Pertemuan terbuka yang terjadi antara Alharis dan

⁷⁰ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fauzi Ansori Selaku Ketua Bapillu DPD Demokrat Provinsi Jambi, 19 Mei 2025

Partai Demokrat menjadi force penting dalam mempererat hubungan kedua pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa kedekatan yang terjalin lebih didasarkan pada kepentingan politik dan upaya membangun koalisi, bukan semata-mata karena hubungan individual atau kekerabatan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya indikator hubungan personal dalam konteks teori patronase, di mana kedekatan personal antara Alharis dengan partai Demokrat menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan politik mereka. Kedekatan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga terkait dengan interaksi yang intens dan berkelanjutan, seperti keterlibatan dalam undang-undang pemerintahan daerah dan kegiatan roadshow yang dilakukan Alharis ke berbagai partai. Dalam teori Patronase, hubungan personal mencakup ikatan emosional, kekerabatan, atau jaringan sosial yang memperkuat kesetiaan dan dukungan antara patron dan klien. Pertemuan terbuka dan silaturahmi yang terjalin secara langsung ini memperkuat jaringan Patronase dengan membangun kepercayaan dan loyalitas yang lebih dalam. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan pola patronase yang khas, di mana hubungan personal menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan dukungan politik, sekaligus memperkuat posisi politik Alharis melalui jaringan interpersonal yang erat dengan partai Demokrat.

Wawancara bersama bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW

PPP Provinsi Jambi mengatakan:

“Pendekatan secara persuasif sering dilakukan bersama paslon mulai dari pendekatan secara hobi seperti main bola bersama dan lain lain, disaat pertemuan secara hobi tersebut juga masih dalam konteks kepentingan

politik. Jadi ada kedekatan dengan paslon secara personal antara PPP dengan paslon bisa dibilang iya”⁷¹

Dari wawancara diatas Pendekatan persuasif seringkali menjadi strategi yang digunakan oleh partai politik, termasuk PPP, dalam membangun hubungan dengan pasangan calon (paslon). Pendekatan ini tidak hanya dilakukan melalui forum-forum formal, tetapi juga melalui kegiatan yang lebih santai dan individual, seperti kegiatan hobi bersama. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan terjalin kedekatan emosional dan pemahaman yang lebih mendalam antara partai dan paslon.

Kegiatan-kegiatan hobi bersama ini, meskipun terkesan informal, tetap dilakukan dalam konteks kepentingan politik. Artinya, setiap interaksi dan komunikasi yang terjadi selama kegiatan tersebut tetap diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu, seperti membangun dukungan, memperkuat citra positif, atau menyelaraskan visi dan misi. Dengan demikian, pendekatan persuasif ini menjadi alat yang efektif dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara partai dan paslon. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kedekatan individual antara PPP dan paslon yang dibangun melalui pendekatan persuasif ini. Kedekatan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga didasarkan pada kesamaan minat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PPP berupaya membangun hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan paslon, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang.

⁷¹ Wawancara Bersama Bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi, 2 Mei 2025

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya indikator hubungan personal dalam teori patronase, di mana pendekatan persuasif yang dilakukan melalui kegiatan bersama seperti bermain bola menciptakan kedekatan personal antara PPP dan Paslon. Dalam konteks Patronase, hubungan personal melibatkan ikatan emosional dan sosial yang memperkuat kesetiaan dan dukungan antara patron dan klien. Meskipun kegiatan tersebut bersifat santai dan informal, tetap berada dalam kerangka kepentingan politik, sehingga kedekatan yang terjalin tidak hanya bersifat personal, tetapi juga strategis sebagai bagian dari proses membangun jaringan patronase. Kedekatan personal ini berfungsi sebagai modal sosial yang penting untuk menjaga hubungan timbal balik dan loyalitas politik, sekaligus memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam mencapai tujuan politik bersama. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan patronase yang terjadi antara PPP dan paslon tidak hanya bersifat formal dan institusional, tetapi juga didukung oleh ikatan personal yang kuat, yang menjadi salah satu indikator utama dalam teori Patronase.

Di internal DPW PKS Jambi Wawancara Bersama Bapak Afrial selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi mengatakan:

“Hubungan antara partai PKS dengan Haris-Sani dari awal periode sangat baik, karena sudah mendukung dimperiode pertama, adanya kedekatan dengan paslon baik secara personal ataupun karena hubungan politik tadi karena sering bertemu untuk kebutuhan masing masing, terjalinlah hubungan bersama partai”⁷²

⁷² Wawancara Bersama Bapak Afrial Selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi, 21 Februari 2025

Dari wawancara diatas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin hubungan yang baik dengan Haris-Sani sejak awal periode pemerintahan, yang diawali dengan dukungan mereka pada periode pertama. Kedekatan ini terjalin baik secara individual maupun melalui hubungan politik, yang ditandai dengan pertemuan rutin untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Interaksi yang berkelanjutan ini mempererat hubungan antara PKS dan Haris-Sani. Pertemuan yang sering dilakukan untuk membahas berbagai kebutuhan politik dan pribadi semakin memperkokoh jalinan kerjasama di antara mereka. Dengan demikian, fondasi yang kuat ini memungkinkan PKS dan Haris-Sani untuk terus bekerja sama dan saling mendukung dalam berbagai agenda politik. Hubungan yang harmonis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak serta stabilitas politik secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut menggambarkan pola hubungan patronase dengan indikator hubungan personal yang kuat antara partai PKS dan pasangan Haris-Sani. Kedekatan yang terjalin sejak awal periode pertama, termasuk dukungan yang sudah diberikan sebelumnya, menunjukkan adanya ikatan emosional dan sosial yang mendalam antara patron (PKS) dan klien (Haris-Sani). Seringnya pertemuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing memperkuat hubungan personal tersebut, yang dalam teori patronase menjadi fondasi utama dalam membangun kesetiaan dan dukungan politik yang berkelanjutan. Hubungan personal ini tidak hanya bersifat formal atau strategis, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dan intens yang mempererat jaringan patron-klien, sehingga memperkuat posisi politik kedua belah pihak. Dengan demikian, pernyataan ini mencerminkan bagaimana

indikator hubungan personal dalam patronase berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan dukungan politik di tingkat lokal.

Di internal Gerindra wawancara bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris mengatakan:

“Sebelum Pilkada Jambi 2024, hubungan individual antara Partai Gerindra dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani belum begitu terlihat secara eksplisit, tetapi ada beberapa indikasi yang menunjukkan kedekatan tersebut. Al Haris juga merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mana Gerindra juga termasuk di dalamnya. Selain itu, Gerindra menilai Al Haris sangat terbuka terhadap kebebasan partai politik di Jambi dan berhasil memenangkan Prabowo-Gibran sebesar 65 persen di Jambi. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting bagi Gerindra dalam memberikan dukungan.”⁷³

Dari Wawancara diatas sebelum Pilkada Jambi 2024, hubungan individual antara Partai Gerindra dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani belum begitu terlihat secara eksplisit, tetapi ada beberapa indikasi yang menunjukkan kedekatan tersebut. Kabar mengenai dukungan Gerindra terhadap duet Haris-Sani dalam Pilgub Jambi 2024 mulai mencuat setelah viral di TikTok dan dibenarkan oleh sejumlah internal Gerindra Jambi. Al Haris juga merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mana Gerindra juga termasuk di dalamnya. Selain itu, Gerindra menilai Al Haris sangat terbuka terhadap kebebasan partai politik di Jambi dan berhasil memenangkan Prabowo-Gibran sebesar 65 persen di Jambi. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting bagi Gerindra dalam memberikan dukungan.

⁷³ Wawancara Bersama Bapak Arman Siregar Selaku Wakil Sekretaris, 21 Februari 2025

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi antara Gerindra dengan partai-partai dalam KIM, termasuk Pan yang sudah lebih dulu memberikan dukungan kepada Al Haris, dukungan Gerindra terhadap Haris-Sani sangat mungkin terjadi. Meskipun rekomendasi resmi belum diterbitkan pada saat itu, sinyal-sinyal dukungan sudah terlihat, dan akhirnya terwujud.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya indikasi hubungan personal dalam teori patronase, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai ikatan personal yang kuat sebelum Pilkada Jambi 2024. Hubungan patron-klien dalam teori Patronase seringkali melibatkan kedekatan personal atau hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak. Al Haris yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), di mana Gerindra juga termasuk di dalamnya, menciptakan kesamaan kesetiaan yang dapat memperkuat hubungan patronase. Selain itu, penilaian Gerindra bahwa Al Haris terbuka terhadap partai politik dan kemampuannya memenangkan Prabowo-Gibran dengan persentase tinggi di Jambi, menunjukkan adanya transaksi atau keuntungan bagi kedua belah pihak dalam hubungan ini. Meskipun hubungan ini digambarkan sebagai kepentingan politik, kedekatan yang terjalin melalui kesamaan tujuan dan keberhasilan bersama dapat menjadi dasar bagi pengembangan hubungan personal yang lebih dalam di kemudian hari. Dalam politik patronase, relasi pertukaran ini terjadi atas dasar kepentingan, di mana patron (Gerindra) memiliki kepentingan dalam mencapai kekuasaan dan klien (Al Haris-Sani) dapat memiliki jaminan dukungan politik.

Di internal DPW Golkar Jambi Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli mengatakan:

“Sebelum Pilkada Jambi 2024, hubungan individual antara Partai Golkar dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani sudah terjalin cukup baik. Meskipun awalnya ada spekulasi mengenai calon yang akan diusung oleh Golkar, akhirnya partai tersebut memutuskan untuk mendukung Haris-Sani. eputusan Golkar didasari oleh berbagai pertimbangan strategis. Al Haris, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi, dinilai memiliki rekam jejak yang baik dan telah menunjukkan komitmen dalam memajukan Jambi. Selain itu, dukungan terhadap Haris-Sani juga memperkuat koalisi partai dalam menghadapi Pilgub 2024. Golkar melihat bahwa mendukung Haris-Sani adalah langkah terbaik untuk memenangkan Pilgub Jambi dan melanjutkan pembangunan di Jambi.”⁷⁴

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebelum Pilkada Jambi 2024, Partai Golkar telah menjalin hubungan yang cukup baik dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani. Meskipun sempat ada spekulasi mengenai calon yang akan diusung, Golkar akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Haris-Sani. Keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, termasuk rekam jejak Al Haris sebagai Gubernur Jambi dan potensi kemenangan yang lebih besar. Golkar melihat dukungan terhadap Haris-Sani sebagai langkah terbaik untuk memenangkan Pilgub Jambi dan melanjutkan pembangunan di Jambi. Ketua DPD I Golkar Jambi, Cek Endra, bahkan menginstruksikan seluruh kader untuk memenangkan pasangan ini.

Dukungan ini juga memperkuat posisi Haris-Sani dengan menambah jumlah kursi parlemen menjadi 50. Keputusan Golkar ini menunjukkan bahwa partai tersebut memiliki keyakinan terhadap kemampuan Haris-Sani untuk

⁷⁴ Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi Selaku Staf Ahli DPW Golkar Jambi, 7 Mei 2025

memimpin Jambi ke depan. Dengan dukungan dari Golkar, koalisi yang mengusung Haris-Sani semakin solid dan memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Jambi 2024.

Pernyataan mengenai hubungan antara Partai Golkar dengan pasangan Al Haris dan Abdullah Sani sebelum Pilkada Jambi 2024 mencerminkan pola patronase dengan indikator hubungan personal yang melekat dalam teori patronase politik. Hubungan yang sudah terjalin cukup baik dan keputusan Golkar untuk mendukung Haris-Sani bukan sekadar pilihan pragmatis, tetapi juga didasarkan pada rekam jejak dan komitmen Al Haris sebagai Gubernur Jambi yang dianggap membawa kemajuan signifikan. Dalam teori patronase, Golkar sebagai patron memberikan dukungan politik kepada Haris-Sani yang menjadi klien sebagai balasan atas kinerja dan janji keberlanjutan pembangunan, yang sekaligus memperkuat koalisi partai dan posisi politik mereka di daerah. Kedekatan yang terbangun ini mencerminkan adanya hubungan personal dan institusional yang saling menguntungkan, di mana Golkar sebagai patron memanfaatkan sumber daya politiknya untuk mempertahankan kekuasaan, sementara Haris-Sani sebagai klien mendapatkan legitimasi dan dukungan yang memperkuat posisinya. Pola ini sesuai dengan konsep patronase yang menekankan pertukaran sumber daya dan loyalitas dalam hubungan patron-klien demi tujuan bersama, yakni kemenangan politik dan kelanjutan pembangunan di Jambi.

Wawancara bersama bapak Citra Darminto selaku pengamat politik mengatakan:

”Dilihat dari kontestasi politik, koalisi itu terbentuk pertama atas kepentingan dan kesepakatan dari elit-elit politik maupun dari masyarakat.

Yang kedua koalisi itu terbentuk atas dasar sama visi dan misi dari masing-masing koalisi. Tentu ini tidak lepas koalisi ini terbentuk atas peran tim sukses salah satu kandidat itu juga. Kita lihat dari Alharis-Sani pertama ia sebagai *incumbent* sudah cukup bagus dan secara personal baik beliau sudah melakukan konsolidasi dengan partai politik sehingga lebih mudah membentuk koalisi dan beliau juga sudah dikenal di kalangan elit-elit politik bisa dibilang popularitas beliau juga menjadi pengaruh besar. Menurut saya terjadi juga hubungan patron-klien dan pasti ada karena secara history nya selama lima tahun beliau jadi Gubernur Jambi patronklien ini pasti ada dan tidak lepas dari itu. Jika bertanya adakah pembagian kekuasaan dalam koalisi dukungan Haris-Sani tersebut dalam pengamatan kita sebagai pengamat politik yang kita lihat selama ini di provinsi Jambi tidak terlalu kentara, tapi tidak bisa dipungkiri itu pasti ada.”⁷⁵

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa koalisi terbentuk atas kepentingan dan kesepakatan elit politik serta masyarakat sangat relevan. Pasangan Al Haris-Sani diusung oleh koalisi besar yang terdiri atas 14 partai politik, termasuk partai penguasa parlemen dan non-parlemen, yang menunjukkan adanya kesepakatan elit partai untuk mendukung pasangan ini demi meneruskan pembangunan di Jambi. Koalisi ini juga didukung tokoh-tokoh penting dari berbagai latar belakang, memperkuat basis dukungan mereka. Koalisi tidak hanya terbentuk karena kepentingan pragmatis, tetapi juga didasarkan pada visi dan misi yang sama untuk pembangunan Jambi, sebagaimana terlihat dari dukungan luas partai dan tokoh yang sepaham dengan arah kepemimpinan Al Haris-Sani. Hal ini memperkuat stabilitas koalisi dan memudahkan konsolidasi politik.

Tim sukses memiliki peran penting dalam menggerakkan dukungan masyarakat dan mengelola kampanye, sebagaimana disampaikan oleh Al Haris yang menekankan pentingnya tim pemenang untuk merangkul masyarakat secara

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Citra Darminto Selaku Pengamat Politik, Kamis 12 Juni 2024

luas dalam waktu kampanye yang terbatas. Tim sukses yang dikomandoi oleh tokoh berpengalaman seperti mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus juga menjadi faktor strategis. Sebagai incumbent, Al Haris memiliki keunggulan dalam hal pengenalan dan konsolidasi dengan partai politik, yang memudahkan pembentukan koalisi besar. Popularitas dan jaringan elit politiknya menjadi modal besar dalam kontestasi ini.

Pernyataan adanya hubungan patron-klien dalam koalisi ini sesuai dengan fenomena politik lokal yang umum terjadi, di mana elite politik (patron) memiliki pengaruh kuat atas pendukungnya (klien) melalui jaringan sosial dan politik yang sudah terbangun selama masa jabatan. Dalam konteks Jambi, selama lima tahun Al Haris menjabat Gubernur, hubungan ini sudah terbentuk dan berperan dalam menguatkan dukungan politik. Meski pembagian kekuasaan dalam koalisi tidak terlalu kentara secara publik, secara implisit hubungan patron-klien dan pembagian kekuasaan pasti ada sebagai bagian dari dinamika politik lokal. Pernyataan tersebut menggambarkan realitas politik koalisi di Pilgub Jambi 2024 dengan baik. Koalisi Al Haris-Sani terbentuk atas dasar kepentingan politik elit dan masyarakat, kesamaan visi-misi, serta peran aktif tim sukses. Keunggulan incumbent dan popularitas elit politik memperkuat posisi mereka, sementara hubungan patron-klien menjadi bagian dari strategi politik lokal yang tidak bisa diabaikan. Pembagian kekuasaan dalam koalisi memang tidak terlalu terlihat, tetapi secara politik pasti ada sebagai konsekuensi dari koalisi yang kompleks ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai ketimpangan, hubungan resiprositas, loyalitas, dan hubungan personal dalam konteks politik patron-klien di Jambi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara patron (partai politik) dan klien (pasangan calon) tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, emosional, dan strategis. Ketimpangan dalam hubungan ini terlihat dari distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak seimbang, di mana patron memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan politik dan sumber daya, sementara klien bergantung pada patron untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan.

Meskipun para partai politik menyatakan bahwa dukungan mereka kepada pasangan calon tidak didasarkan pada ketimpangan atau loyalitas, analisis menunjukkan bahwa terdapat pola patronase yang kuat, di mana loyalitas dan hubungan personal menjadi faktor penting dalam mempertahankan dukungan politik. Hubungan resiprositas juga terlihat dalam pertukaran keuntungan antara patron dan klien, di mana masing-masing pihak saling memberikan dukungan dan sumber daya untuk mencapai tujuan politik bersama.

4.2. Saran

1. Peningkatan Transparansi: Disarankan agar partai politik meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan dukungan terhadap pasangan calon. Hal ini dapat membantu mengurangi persepsi ketimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik.

2. Penguatan Keterlibatan Masyarakat: Partai politik perlu melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai partisipan dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya.

3. Pendidikan Politik: Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar mereka memahami dinamika politik patron-klien dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih dan anggota masyarakat.

4. Evaluasi Kinerja: Partai politik sebaiknya melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pasangan calon yang didukung, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi janji politik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Pengembangan Jaringan: Disarankan agar partai politik membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta, untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hubungan patron-klien dalam politik dapat menjadi lebih seimbang, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Syakir Media Press, n.d.
- James.C.Scoot, *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm 7
- James.C.Scoot, *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm 8
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm 247.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,Kualitaif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-3, 2007), hlm. 249

JURNAL

- Afif. "Pengertian Dan Sejarah Singkat Pilkada Di Indonesia." *ANTARA*, May 24, 2024.
- Herman, Sudirman, Ihyani Malik, and Riska Sari. "SOSIALISASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA." Vol. 2, 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Iwan, Sidih. "RELASI PATRON KLIEN DALAM KETERPILIHAN RAY SURYADI ARSYAD PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DAPIL II KOTA MAKASSAR," n.d.
- Komar, Zaman, and Kausar. "ANALISIS HUBUNGAN PATRON-KLIEN (STUDI KASUS HUBUNGAN TOKE DAN PETANI SAWIT POLA SWADAYA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU)." Vol. 2, 2011.
- Lenaini, Ika, and Riwayat Artikel. "TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING INFO ARTIKEL ABSTRAK" 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>.
- Soleman, Mochdar, and Kamaruddin Salim. "HUBUNGAN PATRON-KLIEN DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GERINDRA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014," n.d.

WEBSITE/ARTIKEL

Almunanda, Ferdi. "Gerindra Susul PDIP Usung Al Haris-Sani Secara Resmi Di Pilgub Jambi ." detiksumbagsel, August 24, 2024.

"Menang Di 10 Daerah, Al Haris-Sani Raih 1.092.823 Suara Di Pilgub Jambi," n.d. <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7677520/menang-di-10-daerah-al-haris-sani-raih-1-092-823-suara-di-pilgub-jambi>.

Ayu, Dewi Rizki. "Sejarah Prabowo Mendirikan Partai Gerindra, Pernah Diejek Dan Dihina." Accessed April 9, 2025. <https://www.tempo.co/politik/sejarah-prabowo-mendirikan-partai-gerindra-pernah-diejek-dan-dihina-1206956>.

Batolone, Vidi. "Pendiri Partai Demokrat Tegaskan SBY Pengagas Lambang "Bintang Segi Tiga Merah Putih," n.d. <https://www.kompas.tv/nasional/164732/pendiri-partai-demokrat-tegaskan-sby-pengagas-lambang-bintang-segi-tiga-merah-putih>.

Buruh, Partai, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-undang Nomor, Jenis Perkara, Pokok Perkara, and Amar Putusan. "IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 60 / PUU-XXII / 2024 Tentang Syarat Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah" 000 (2024): 1–9.

Golkar. "Sejarah Partai Golkar." Accessed December 13, 2024. <https://www.partaigolkar.com/profil>.

Mairiadi, Nenang. "KPU Provinsi Jambi Segera Tetapkan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024," n.d. <https://jambi.antaranews.com/berita/600606/kpu-provinsi-jambi-segera-tetapkan-gubernur-terpilih-hasil-pilkada-2024>.

"Penduduk Jambi Bertambah 176 Ribu, Sehingga Total 3,7 Juta Jiwa," n.d. <https://jambi.antaranews.com/berita/571638/penduduk-jambi-bertambah-176-ribu-sehingga-total-37-juta-jiwa>.

"Makna Lambang Gerindra," n.d. <https://gerindra.id/makna-lambang/>.

"Makna Lambang PKB." Accessed April 20, 2025. <https://pkb.id/page/makna-lambang/>.

"Profil Perkembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi," n.d. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-jambi/>.

"Profil PPP." Accessed April 17, 2025. <https://ppp.or.id/2021/12/06/visi-misi-ppp/>.

Rahmawati, Dwi. "Tiga Pasang Calon Pemimpin Untuk Warga Jakarta." detikNews, September 23, 2024.

Redaksi. "14 Partai Koalisi Al Haris-Sani Siap Menangkan Pilgub Jambi 2024." JERNIH.ID, August 28, 2024.

"Sejarah Partai Demokrat." Accessed April 17, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-partai-demokrat/>.

"Sejarah Partai Gerindra." Accessed April 9, 2025. <https://gerindra.id/sejarah-partai-gerindra/>.

"Sejarah Partai Keadilan Sejahtera." Accessed April 30, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-keadilan-sejahtera-pks/>.

"Sejarah Partai PDI." Accessed April 4, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan/>.

"Sejarah PKB," n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-partai-kebangkitan-bangsa-pkb/>.

"Sejarah Singkat PPP." Accessed April 25, 2025. <https://ppp.or.id/2021/12/06/sejarah-singkat-ppp/>.

Sultoni. "Mengulik Makna Tersirat Di Balik Perubahan Logo PPP," n.d. <https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/63bb3bd008a8b533cd62bc02/mengulik-makna-tersirat-dibalik-perubahan-logo-ppp>.

Tetuko, Puger Pondra. "Makna Logo PDIP, Banteng Berwarna Hitam Dengan Latar Warna Merah," n.d. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/09/makna-logo-pdip-banteng-berwarna-hitam-dengan-latar-warna-merah>.

Tuyani. "KPU Jambi Tetapkan DPT 2,69 Juta Pemilih Pada Pilkada 2024," n.d. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/589403/kpu-jambi-tetapkan-dpt-269-juta-pemilih-pada-pilkada-2024>.

"Visi & Misi Fraksi Demokrat." Accessed April 17, 2025. <https://fpd-dpr.com/index.php/visi-misi>.

"Visi Misi Gerindra." Accessed April 9, 2025. <https://gerindra.id/visi-misi/>.

"Visi Misi Partai Golkar," n.d. <https://golkarbali.com/visi-misi-partai-golkar/>.

"Visi Misi PKB." Accessed April 9, 2025. <https://pkb.id/page/visi-misi/>.

"Visi Misi PKS." Accessed April 17, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/partai-keadilan-sejahtera-pks/>.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara DPW PDIP Per Provinsi Jambi pada 3 Mei 2025

Narasumber: Bapak Edi Purwanto selaku ketua umum DPW PDIP Provinsi Jambi



2. Wawancara DPW PKB Jambi pada 1 Mei 2025

Narasumber : Eko Supriyanto selaku wakil sekretaris DPW PKB Jambi



3. Wawancara DPW Demokrat Jambi

Narasumber ; Bapak Dr.Ir. Ahmad Fauzi Ansori.M.T selaku ketuaJad Badan Pemenangan Pemilu (BAPILLU) partai Demokrat Jambi juga ketua Fraksi Demokrat



4. Wawancara di DPW PPP Jambi, 21 Februari 2025

Narasumber: Bapak Ahmad Said Selaku Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi



5. DPW PKS Jambi, 21 Februari 2025

Narasumber: Bersama Bapak Afrial selaku Wakil Sekretaris II DPW PKS Jambi



6. Gerindra Jambi, 21 Februari 2025

Narasumber: Bapak Arman Siregar selaku Wakil Sekretaris



7. DPW Golkar, 7 Mei 2025

Narasumber: Wawancara Bersama Bapak Achmad Syauqi selaku Staf Ahli



8. Pengamat Politik 12 Juni 2025

Narasumber: Citra Darminto



CURICULUM VITAE**DATA DIRI**

Nama : Nurul Syafitri
Tempat/Tanggal Lahir : Tenam, 15 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tenam, Kecamatan Muara Bulian
Alamat Email : safitrinurul468@gmail.com
Nomor Handphone :0887437095758

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 110 DESA TENAM : Tamat tahun 2012
MTS NEGERI SRIDADI : Tamat tahun 2016
SMA NEGERI 6 BATANGHARI : Tamat tahun 2020